

Gerbatama

Produk Pers Suara Mahasiswa UI

Ini UI!

What Do You Think?

Antara Ada dan Tiada:
Berjumpa dengan Penganut Agama
Minoritas di Kampus Makara

FEATURE

Stigma Diskriminatif dan Label
Politik Tersepat di Pakaian Mereka

LIPUTAN UTAMA

Menyelami Pusaran
Jakartasentrisme dalam UI

Warna-Warni Mereka
di Bawah Payung UI

Meraba-raba Jalinan Multikultur dan Interseksi

EDITORIAL

UI kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Agaknya, muncul pertanyaan, apa yang membuat UI menjadi selayaknya miniatur negeri?

Di tengah semrawut pinggir Ibukota, UI menjelma suatu peradabanyangasingdengan sekelilingnya. Tembok yang memisahkan lingkungan UI yang asri dengan permukiman padat di sekelilingnya membuat sebuah pembatasan yang nyata sekali. Lalu bagaimana dengan iklim di dalam UI, apakah kita juga terbatas oleh tembok-tembok identitas yang imajiner? Mungkin anggapan bahwa UI adalah universitas yang majemuk adalah benar, karena nyatanya memang manusia di UI sangat heterogen. Dari ujung Sumatra hingga Papua, ribuan sivitas berbaur di bawah naungan Makara.

Maka selanjutnya, muncullah pertanyaan susulan: apakah UI sudah menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen sivitasnya? Tentulah, spektrum keberagaman di UI tak hanya terbatas pada daerah asal mahasiswa. Identitas gender, keyakinan, pilihan, dan kesempatan juga mewarnai keberagaman UI— yang juga harus difasilitasi dan dijamin keamanan serta kebebasannya.

Lantas, apakah UI sudah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi segenap sivitasnya yang multikultur? akan menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Kita harus senantiasa bertanya (pada pemangku kebijakan) dan mencipta (pada diri kita sendiri) untuk membumikan angan ini, agar tak hanya

menjadi sekadar cita. Kamu, saya, kalian, kami, mereka— kita semua memiliki kewajiban menyediakan ruang impian itu di universitas ini.

“Because when there is true equality, resentment does not exist.”

— Chimamanda Ngozi Adichie

STRUKTUR SUARA MAHASISWA 2021

Pemimpin Umum

Faizah Diena Hanifa

Sekretaris Umum

Hani Nastiti

Humas

Novia Sarifa Az-Zahra

Wakil Humas

Muhammad Rihan Rizki

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fira Izdihar

Wakil Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arnetta Iftita

Pemimpin Redaksi

Nada Salsabila

Redaktur Pelaksana Satu

Giovanni Alvita Diera

Redaktur Pelaksana Dua

Syifa Nadia Rahmawati

Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan

Ruth Margaretha M.

Wakil Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan

Dimas Andriansyah

Kepala Divisi Tata Letak dan Pracetak

Emir Faritzzy

Wakil Kepala Divisi Tata Letak dan Pracetak

Adelia Febiyanti

Kepala Divisi Fotografi

Justin Amudra P.

Kepala Divisi Videografi

Anggara Alvin I.

Kepala Perusahaan

Nabila Nurunnisa. F

Wakil Kepala Perusahaan

Bayu Trian

STRUKTUR REDAKSI BULETIN GERBATAMA

Pemimpin Redaksi
Nada Salsabila

Redaktur Pelaksana
Syifa Nadia
Muhammad Firman

Reporter
Giovanni Alvita Diera
Faizah Diena Hanifa
Satrio Alif Febriyanto
Rifki Wahyudi
Arnetta Nandy
Muhammad Lutfi Sadra
Mohammad Farhan
Sekar Arum A.W
Intan Eliyun
Salma Aulia
Humairah Nur Ramadilah

Fotografer
Anggara Alvin L
Faiz Mudrika
Mikail Arya
M. Azkal Fuady

**Desain, Tata Letak, dan
Pracetak**
Emir Faritzzy S.N
Adelia Febriyanti
Anggit Magistra
Rizal Taufiqurrafi
Amalia
Lazzuarda Pramudita A
Salwaa Zahra P. N

1 INFOGRAFIS SEBARAN MAHASISWA UI

3 LIPUTAN UTAMA
Menyelami Pusaran Jakartasentrisme dalam UI

6 LIPUTAN KHUSUS
Rasialisme terhadap Orang Papua: Apakah Lingkungan Akademik UI Sudah Bersih dari Diskriminasi

8 LIPUTAN UTAMA
Warna-Warni Mereka di Bawah Payung UI

13 GALERI FOTO
Sejuta Ragam Makara

15 WHAT DO YOU THINK?
Antara Ada dan Tiada: Berjumpa dengan Penganut Agama Minoritas di Kampus Makara

17 LIPUTAN KHUSUS
Melihat dengan suara, Cerita Kawan-Kawan Disabilitas Netra UI

19 FEATURE
Stigma Diskriminasi dan Label Politik Tersepat di Pakaian Mereka

22 RESENSI
Tanda Tanya serta Luka dalam Pluralisme Kita

23 OPINI SUMA
Queering Care: Alternatif Melampaui Sekat-Sekat Kasih Konvensional

25 SELISIK
Produktif Sampai Mati: Fenomena *Hustle Culture* pada Mahasiswa

27 OPINI PEMBACA

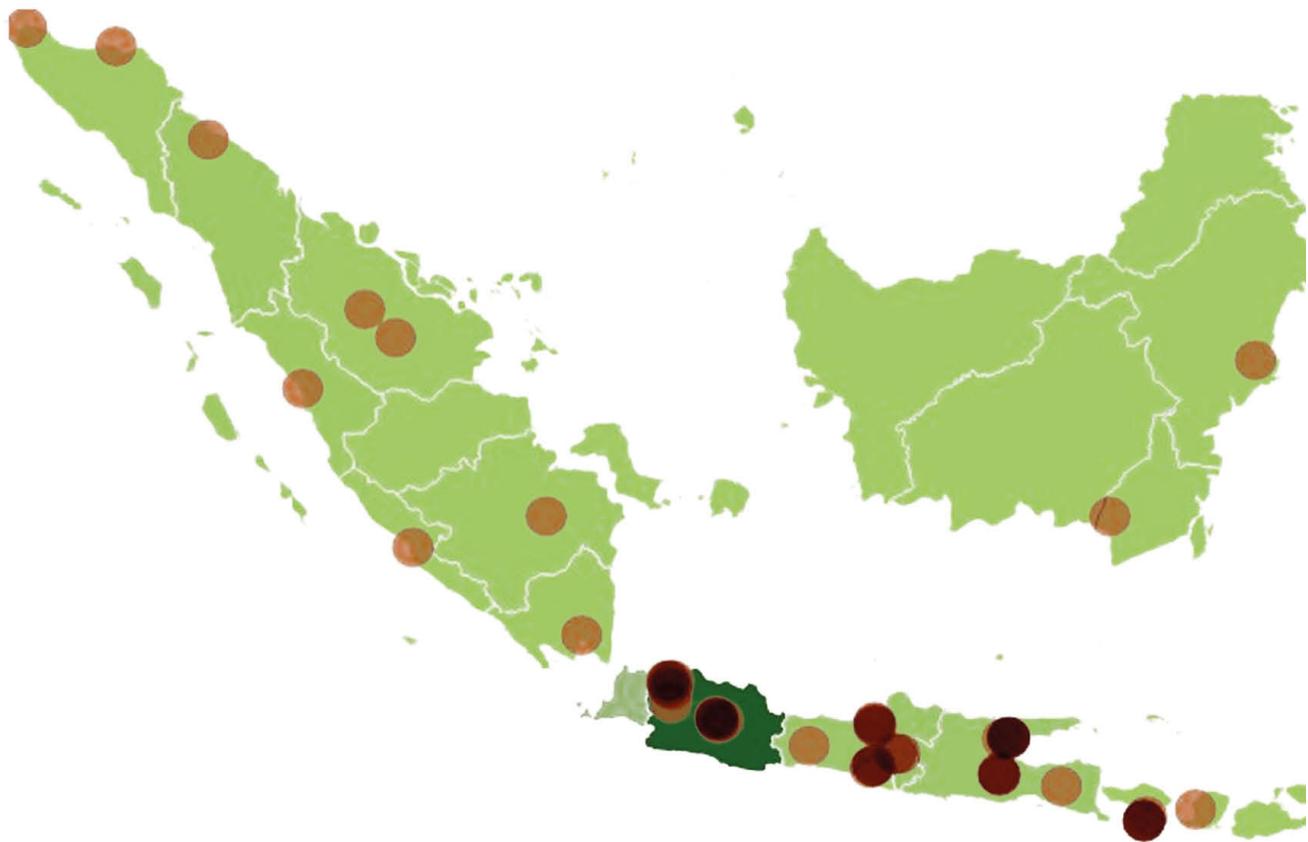
KONTEN

SEBERAPA 'INDONESIA' UNIVERSITAS

Berdasarkan Provinsi Di Indonesia



Low High



Berikut jumlah pasti sebaran mahasiswa UI angkatan 2019-2021

- DKI Jakarta (13.386)
- Jawa Barat (11.357)
- Banten (4.010)
- Jawa Tengah (1.311)
- Jawa Timur (1.228)
- Sumatera Utara (650)
- Sumatera Barat (494)
- Lampung (397)
- Sumatera Selatan (333)

- Riau (297)
- D.I. Yogyakarta (252)
- Sulawesi Selatan (199)
- NTB (177)
- Jambi (171)
- Kalimantan Timur (168)
- Kep. Riau (161)
- Kalimantan Barat (160)
- Bali (159)
- NAD (131)
- Bengkulu (112)
- Kalimantan Selatan (82)

- Maluku (81)
- Sulawesi Utara (77)
- Sulawesi Tenggara (76)
- Sulawesi Barat (63)
- Papua (57)
- Kalimantan Tengah (57)
- Kep. Bangka-Belitung (53)
- Sulawesi Tengah (33)
- Papua Barat (33)
- NTT (28)
- Gorontalo (25)
- Kalimantan Utara (24)

INDONESIA' KAH, INDONESIA?

Sebaran Top 50 Mahasiswa Universitas Indonesia



Meskipun mengemban nama Indonesia di dalamnya, di Universitas Indonesia sendiri, mahasiswa dan mahasiswinya masih terpusat di Pulau Jawa

terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Padahal, berdasarkan data Webometrics pada tahun 2020, daerah dengan universitas yang termasuk

top 50 terbaik di Indonesia juga belum merata di semua provinsi Indonesia.

MENYELAMI PUSARAN JAKARTA SENTRISME DALAM UI

Teks : Nada Salsabila dan Faizah Diena

Beberapa tahun terakhir, banyak lembaga bimbingan belajar menjual “jaminan masuk UI” sebagai slogan promosi. Terkadang, mereka juga menampilkan nama-nama siswa lembaga tersebut yang diterima di UI. Bila kita menilik ke dalam lembar promosi tersebut, dapat kita lihat asal sekolah siswa-siswa tersebut yang dari satu lembaga bimbingan belajar saja, ada 200 orang sukses masuk UI. Namun jika diperhatikan, hampir seluruh siswa tersebut berasal dari sekolah favorit yang sama dari wilayah Jakarta. Sebagai universitas yang digadag-gadag sebagai satu-satunya universitas yang menyandang nama ‘Indonesia’, apakah UI sudah mewakili Indonesia?

Cerita Yogie dan Tresia Tentang UI

Tresia merupakan mahasiswa asal Nabire, Papua Barat. Ia merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Afirmasi, yaitu beasiswa yang diberikan pada putra-putri daerah yang menempuh kuliah di daerah yang ‘lebih maju’. Menurutnya, salah satu alasan mengapa banyak mahasiswa Papua yang enggan berkuliah ke UI, adalah karena rasa takut akan nama besar UI. “Waktu mendaftar Beasiswa Afirmasi ke perguruan tinggi bersama

teman-teman saya, tidak ada satupun yang mau mengambil kuliah di UI, hanya karena takut dengan nama besar UI,” ujarnya.

Mengutip pernyataan guru SMA-nya, banyaknya siswa Papua yang tak melanjutkan kuliah ke UI adalah karena kemalasan mereka. Cara pandang ini agaknya cukup serampangan, karena masalah pendidikan suatu negara tidak berputar pada malas-tidaknya pelajar.

Mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2020, untuk usia 15-44 tahun, persentase Angka Buta Huruf (ABH) DKI Jakarta adalah sebesar 0,05 persen. Sementara di Provinsi Papua Barat sebanyak 1,53 persen, dan Provinsi Papua sebesar 20,21 persen. Angka yang sangat jauh ini dapat terjadi karena adanya masalah struktural; kesenjangan akses pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Terlepas dari paradigma ‘pendidikan dan kemalasan’ yang kerap menimpa mahasiswa perantauan, khususnya dari daerah terluar, Tresia tetap bersemangat berkuliah di UI. Untuk mengeratkan tali keakraban dengan teman-temannya, ia mengikuti paguyuban Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) UI. “Dengan berkuliah di UI, secara

tidak langsung saya belajar tentang budaya dari teman-teman yang berasal dari Jabodetabek maupun dari luar Jabodetabek.”

Hal yang sama juga diceritakan oleh Yogie yang berasal dari Riau; bahwa banyak teman-temannya yang berasal dari daerahnya seringkali enggan mendaftar ke UI. Keengganan ini dilatarbelakangi dengan titel UI yang terbilang ‘wah’ di mata mereka. “Nggak berani gue buat coba di UI karena *rating* UI terlalu tinggi dan gua harus mencapai nilai A, nilai sekian,” sambung Yogie. Hal ini juga dihadapi oleh Yogie ketika ia melakukan sosialisasi kuliah di UI melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan SIMAK UI. Pada saat itu, banyak siswa SMA mengeluhkan peringkat UI yang terlalu tinggi. Padahal, menurut Yogie tidak ada salahnya jika mencoba mendaftar di UI karena jalan dan rezeki setiap orang berbeda-beda, yang penting sudah berusaha.

Yogie menceritakan pengalamannya di UI yang menurutnya sudah cukup heterogen dengan banyaknya teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa. Sempat mengalami *culture shock* saat masih mahasiswa baru tak menyurutkan Yogie untuk terus beradaptasi di UI yang menurutnya berbeda jauh dari daerah asalnya

'Apa sih lo?,' jadi itu hal pertama yang membuat gue, 'Waduh, gue nggak bisa nih bahasa lo gue,'" ujar Yogie. Pada akhirnya, Yogie dapat juga beradaptasi dan menjadi mahasiswa aktif. Pun, ia menjabat sebagai Wakil Ketua BEM UI 2021. Menurutnya, OKK dan paguyuban di UI sangat membantu dirinya dalam beradaptasi dan mengenal UI lebih dalam.

Akses dan Pemerataan Kesempatan Berkuliah di UI

Pada Rencana Strategis UI 2020-2025, tercantum salah satu misi UI, yaitu *menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas*. Poin ini secara langsung mengafirmasi upaya pemerataan akses pada tiap mahasiswa UI. Pada dokumen yang sama, disebutkan pula salah satu tujuan UI, yaitu *menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan keberhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat*. Menjadi universitas yang inklusif adalah mimpi UI. Namun, menghasilkan lingkungan pendidikan yang inklusif agaknya masih jauh untuk dikejar.

Berdasarkan data persebaran daerah asal mahasiswa UI angkatan 2019-2021—yang berjumlah 35.842 mahasiswa—diketahui bahwa mahasiswa asal DKI Jakarta masih menjadi nomor satu. Dari tiga angkatan tersebut, jumlah mahasiswa asal DKI Jakarta adalah 13.386 mahasiswa. Peringkat dua hingga lima, lagi-lagi, diisi provinsi dalam Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (11.357), Banten (4.010), Jawa Tengah (1.311), dan Jawa Timur (1.228).

Provinsi dengan asal mahasiswa terendah adalah Kali-

mantan Utara, yang hanya memiliki 24 mahasiswa di UI. Peringkat terendah lainnya ada pada Gorontalo yang berjumlah 25 mahasiswa dan Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 28 mahasiswa. Persentase mahasiswa angkatan 2019-2021 asal DKI Jakarta sebesar 37,35 persen, sementara Kalimantan Utara hanyalah 0,07 persen. Kalimantan Utara, sebagai provinsi paling bungsu di Indonesia, agaknya belum memiliki akses pendidikan yang setara dengan Jakarta. Jumlah ini tentunya menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dari data statistik dari tiga angkatan ini.

Pendidikan yang 'Jakartasentris' seolah-olah memberi banyak kemudahan pada siswa asal Jakarta untuk diterima di UI. Kembali lagi, dengan ketimpangan yang terpampang nyata seperti ini, bagaimana langkah UI untuk mewujudkan cita-cita inklusivitasnya?

Upaya Pemerataan yang Belum (dan Sulit) Maksimal

Jalur masuk UI dapat dilakukan lewat dua mekanisme: undangan (SNMPTN) dan tes tulis (SBMPTN dan SIMAK UI). Merunut pernyataan Dr. Badrul Munir, Direktur Kemahasiswaan UI, jalur undangan merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh UI untuk pemerataan sebaran mahasiswa ke seluruh daerah Indonesia. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, ditetapkan daya tampung mahasiswa jalur SNMPTN minimal 20 persen dari total mahasiswa baru yang akan diterima.

Pada tahun 2021 sendiri, UI menepati aturan tersebut, dengan rincian: SNMPTN (20 persen),

SBMPTN (30 persen), dan SIMAK UI (50 persen). Sementara jalur undangan Paralel, seperti PPKB dan *Talent Scouting*, sama-sama mendahulukan privilese sekolah—hanya terbuka bagi sekolah yang memiliki kerjasama dengan UI. Demikian upaya pemerataan berdasarkan asal wilayah hanya dapat dilakukan pada 20 persen calon mahasiswa di jalur SNMPTN saja. Sementara 80 persen mahasiswa lainnya, bergantung pada jalur masuk tes tulis.

"Untuk SNMPTN—jalur undangan itu—memang kita melakukan pemerataan. Dalam arti kalau kita lepas, sebetulnya yang masuk ya (siswa dari sekolah—red) unggulan semua," tutur Munir.

Bukan rahasia lagi, tes tulis masuk perguruan tinggi di Indonesia memiliki tingkat kesulitan tinggi. Banyak mahasiswa mempertaruhkan biaya bimbingan belajar yang harganya gila-gilaan agar mampu lolos dari jerat tes masuk perguruan tinggi. Merujuk pada data persentase keketatan prodi S1 Reguler tahun 2020, Fisika menjadi salah satu jurusan yang memiliki persentase keketatan rendah, yaitu 19 persen peluang masuk lewat jalur SBMPTN—dari 158 pendaftar, UI menyediakan kursi bagi 30 orang. Namun, tampaknya angka tersebut masih cukup ketat. Bagaimana dengan jurusan primadona di UI? Mari kita ambil contoh jurusan Hubungan Internasional, yang memiliki keketatan sebesar 1,1 persen pada SBMPTN. Dari 1.627 pendaftar, hanya 16 di antaranya yang akan diterima. Secara kasar, mereka yang paling menguasai materi dan soal yang akan lolos.

Membayangkan bagaimana se-

orang calon mahasiswa yang tidak berprivilese, tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, dan tidak mampu membeli buku latihan soal maupun mengikuti bimbel, harus bersaing dengan pendaftar lainnya untuk mendapatkan satu kursi di kampus, sangatlah sulit. Sayangnya, memang UI tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti ketentuan yang ada. Jalur undangan menjadi satu-satunya jalan untuk pemerataan sebaran mahasiswa, karena pada jalur tes tulis, skor yang akan menentukan nasib seseorang. “Kalau berdasarkan ujian saja, mungkin sedikit sekali (mahasiswa—red) dari luar Jakarta. Sehingga memang diperlukan pemerataan,” ujar Munir.

Menggapai Depok dari Luar Jawa

Sebagai mahasiswa FIB angkatan 2020, Tresia belum pernah menginjakkan kakinya di UI. Selama ini, ia berkuliah dari kota asalnya. Sama seperti sebagian besar mahasiswa PJJ, akses internet yang terkadang tidak stabil kerap mengganggu aktivitas belajarnya. “Kadang tidak dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh dosen, karena jaringannya terganggu sehingga suara dosen terputus-putus, bahkan sampai terlempar. Kuota data habis, karena kebetulan saya sendiri belum mendapatkan kuota pembelajaran dari Kemendikbud mulai dari semester satu hingga sekarang pertengahan semester tiga,” untkapnya.

Berbeda dengan Tresia yang mengakses kuliah dari luar pulau Jawa, Yogie sejak awal pandemi sudah berada di Jakarta sehingga lebih mudah dalam mengakses perkuliahan tanpa terkendala dengan sinyal. Walaupun perkuliahan berjalan dengan *online*, teman-teman dari luar daerah tetap terangkul dengan beberapa program

kerja BEM UI seperti UI Etnovaganza yang merupakan acara kebudayaan terbesar di UI dan dihadiri oleh paguyuban dari berbagai daerah.

Memahami Jurang Bernama ‘Akses dan Kesempatan’

Cerita Yogie dan Tresia hanyalah dari ribuan cerita mahasiswa lainnya di UI. Ada ribuan cerita mahasiswa rantau lainnya yang memiliki kesulitan dan kondisi berbeda yang tidak bisa disamakan. Bagi Tresia, pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa daerah lainnya di UI dapat memberi pacuan semangat pada pelajar daerah lainnya. “(Pengalaman mahasiswa daerah lainnya—red) supaya generasi berikutnya mempunyai daya untuk bersaing yang tinggi dan mampu menyelesaikan kuliah di kampus UI, atau tidak, kampus ternama lainnya.”

Meratakan sebaran mahasiswa UI merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diwujudkan mandiri oleh UI. Terutama dengan mekanisme masuk perguruan tinggi yang diikat oleh aturan Kemendikbud, sehingga UI hanya dapat mengontrol pemerataan mahasiswa jalur undangan. Upaya UI untuk mendukung pemerataan akses lainnya, terutama di masa pandemi, seperti melakukan pembelajaran asinkronus, menyediakan perangkat lunak gratis, mengkoordinasikan pembagian bantuan kuota pendidikan, hingga membenahi server EMAS, menjadi hal dengan urgensi tinggi.

Fenomena Jakartasentrisme di UI salah satunya berasal dari ketimpangan kesejahteraan dan pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan masalah pembangunan manusia, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh penyelenggara pendidikan semata. “Tingkat kesejahteraan

masyarakat di sekitaran Jakarta lebih sejahtera, lebih *care* terhadap pendidikan, sehingga akses terhadap pendidikan dan fasilitas yang mereka *spent* untuk pendidikan itu memang lebih tinggi,” ujar Munir. Menurut Munir, hal ini menjadi salah satu alasan dari tidak meratanya sebaran asal daerah mahasiswa UI.

Kendati begitu, Munir menyatakan, masalah ketidakrataan ini sedang ditangani oleh UI. “Terus terang, saya begitu diminta begini, sudah koordinasi dengan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru—red), kita harus punya aturan yang secara spesifik memfasilitasi 3 T (tertinggal, terdepan, terluar—red) itu,” terangnya. “Saya kira itu sangat perlu dan *urgent*, dan ini memang sudah dibahas juga. Implementasinya memang (sedang—red) disiapkan, yang lama tidak ada, di sini (regulasi baru—red) akan dikuatkan.”

RASIALISME TERHADAP ORANG PAPUA: APAKAH LINGKUNGAN AKADEMIK SUDAH BERSIH DARI DISKRIMINASI?

Teks: Giovanni Alvita & Muhammad Firman

Rasialisme mengacu pada penekanan atau pertimbangan terhadap ras, sementara rasisme mengacu pada diskriminasi terhadap suatu ras

Pada 2019 lalu, sebuah insiden rasialisme menimpa sekelompok mahasiswa Papua. Asal masalah tersebut bermula ketika aparat menemukan bendera Merah Putih yang rusak di sebuah selokan di depan asrama mahasiswa Papua. Aparat dan sejumlah organisasi massa lantas mengepung asrama. Pada pengepungan itu, terdapat oknum yang melakukan fasilitas perusakan asrama, penembakan gas air mata, hingga melontarkan makian yang rasis kepada mahasiswa Papua.

Insiden yang terjadi di Surabaya tersebut mulai menyulut orang-orang Papua untuk bicara mengenai rasialisme yang mereka alami. Dilansir dari BBC Indonesia, mahasiswa asal Papua, yakni Tasya Marian dan Priska Mulait, mengaku mendapatkan diskriminasi selama mereka berkuliah di Jakarta. Mereka bahkan kesulitan mendapatkan kamar kos karena para pemilik kos menolak menerima mahasiswa Papua. Ujaran dan hinaan seperti “kalian bau” hingga gelagat menutup hidung pernah dilakukan beberapa orang terhadap mereka. Tak hanya dari masyarakat umum, di lingkungan kampus, mereka juga mendapat diskriminasi. Tasya menceritakan pengalamannya ketika dosennya menuduh orang-orang Papua suka memakan babi mentah.

Sikap-sikap diskriminasi seperti itu cenderung membuat ma-

hasiswa Papua sulit beradaptasi di Jakarta, mereka cenderung berkumpul dengan sesama mahasiswa Papua. Berbicara mengenai diskriminasi tersebut, ada baiknya bila kita menengok sejarah rasialisme terhadap orang Papua.

Menilik Sejarah: Bagaimana Awal Mula Rasisme terhadap Orang Papua?

Diskriminasi terhadap Papua sendiri dapat dilihat dari akar sejarahnya. Pascaperdebatan Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat, proses integrasi Papua ke Indonesia dilakukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 untuk menentukan status Papua, antara milik Indonesia atau Belanda. Dalam referendum itu, Papua memilih bergabung dengan Indonesia.

Meski begitu, Pepera ini menuai ketidakpuasan dari sebagian masyarakat Papua. Dr. Adriana Elisabeth, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan bahwa representasi orang-orang Papua yang terlibat dalam referendum tersebut tergolong kecil sehingga menjadikan hasil Pepera dirasa tidak adil. Selain ketidakpuasan dari penduduk Papua, munculnya operasi militer di Papua turut membuat suasana menjadi lebih panas. Dari operasi militer tersebut, muncul isu-isu HAM, kekerasan negara, hingga kehadiran

aparat yang dinilai represif.

Isu ekonomi sendiri menjadi salah satu isu besar di Papua yang mulai mencuat ketika Freeport masuk ke Papua dan kemudian beroperasi pada 1970. Benturan kepentingan mulai terjadi. Pihak pemerintah membutuhkan investasi dari pihak asing untuk pembangunan, investor memiliki kepentingan untuk meraup keuntungan, sementara masyarakat Papua merasa adanya investasi asing itu, hak-hak mereka tidak diperhatikan. Ditambah lagi, masuknya pertambangan di tanah Papua, dinilai berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Bagi orang Papua, kelestarian lingkungan hidup berarti kelangsungan hidup bagi mereka.

Benturan pandangan dan berbagai isu tersebut, menjadi akar sejarah permasalahan rasialisme. “Jadi, bila rasialisme itu susah diatasi, ya itu akarnya, dari sejarahnya. Jadi yang kita lihat rasialisme sekarang itu hanya permukaannya saja. Itu hanya permasalahan di hilir, sementara kita tidak melihat permasalahan di hulunya,” ujar Adriana.

Faktor penyebab lain dari adanya rasialisme terhadap orang Papua adalah, kerap kali idealisme orang Papua dianggap membahayakan Indonesia. Secara singkatnya, rasialisme itu menguat ketika ada posisi yang tidak setara — dalam hal ini, orang Papua dianggap se-

bagai minoritas yang berbeda. Selain itu, label bahwa "Papua ingin membebaskan diri" selalu hadir ketika orang Papua berusaha mengekspresikan pendapatnya, turut menstigma orang-orang Papua dengan citra yang buruk dan radikal.

Bagaimana Atmosfer Toleransi dan Multikulturalisme di Universitas Indonesia?

Sejumlah mahasiswa asli Papua, beberapa berkuliah di Universitas Indonesia yang tersebar di beberapa fakultas. Salah satunya adalah Maria Christina, Mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2019. Menurut Maria, ada beberapa mahasiswa Papua yang tergabung di dalam organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA). Organisasi tersebut cukup penting untuk menjadi wadah mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi.

Menurut Maria, salah satu tantangan terbesar mahasiswa Papua adalah kuliah daring membuat mereka kesusahan lantaran jaringan internet yang kurang memadai saat berada di Papua. Maria juga merasa bahwa tantangan tersebut harusnya dapat dipahami dengan baik oleh para dosen maupun pihak Dekanat dan Rektorat. Tantangan ini juga berpengaruh ke dalam nilai dan pemahaman dari Maria itu sendiri yang bahkan tidak jarang baru dapat masuk kelas setelah sekian hari atau sekian minggu awal periode belajar mengajar.

Kendala dialek dan juga sebagai perantaraan menjadi salah satu permasalahan adaptasi mahasiswa Papua. Maria sendiri lebih sering bergaul dengan sesama mahasiswa Papua saja. Seperti Maria, Yuliane Ance Wimbis Ketua IMAPA UI 2020, juga menyebutkan bahwa, "Tantangan saat di awal adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya berbicara dan berbahasa dengan teman-teman di sini karena dialek yang

berbeda dengan tempat asal."

Mengenai intoleransi di kampus, Ance menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan perlakuan tersebut. "Sampai saat ini dan sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi ataupun tindakan tidak menyenangkan, karena teman-teman di fakultas semua baik-baik dan toleran sekali, tidak membeda-bedakan," ujar Ance.

Sementara itu, ada Reno Merliando mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2017 yang juga merupakan Ketua IMAPA UI tahun 2018. Mahasiswa asli Raja Ampat ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi asal Papua. Dirinya merupakan perantau dan penerima Beasiswa Afirmasi dari Kemenristekdikti sejak SMA. Namun, Reno menyatakan masih terdapat kesusahan atau stigma terhadap mahasiswa daerah terutama dari Papua oleh mahasiswa lainnya. Dirinya menyatakan terdapat kesusahan adaptasi karena terdapat pergaulan yang terkotak-kotakkan dengan terbagi dalam beberapa peer group. Selain itu, Reno menyatakan masih terdapat dosen atau mahasiswa yang intoleran di lingkungan UI terhadap mahasiswa Papua. "Ada. Sebagian orang masih underestimate menurut gue, beberapa yang lain malah mengapresiasi, (ada pula yang—red) masih suka membeda-bedakan daerah, jadi suka underestimate orang dari daerah."

Reno lebih lanjut mencontohkan hal tersebut dengan sebuah pengalaman dari dirinya dan teman-temannya. "Misalnya ketemu temen gue terus kenalan, terus dia nanya gini, 'asal kamu dari mana saya?'; (kujawab —red) dari Papua, (dia merespon —red), 'oh jadi orang Papua bisa ya kuliah di UI.' Nah, perkataan itu kan secara tidak langsung menganggap orang Papua bodoh."

Berkenaan dengan pengalaman traumatis mahasiswa Papua, Adriana menuturkan, "Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang yang mengalami trauma, syukur-syukur mereka bisa segera move on. Tetapi bagi mereka yang masih sangat traumatik, masih takut, itu kita jangan melabel yang lain-lain," ujar Adriana.

Adriana menambahkan contoh konkret trauma dari seorang mahasiswa Papua. "Waktu itu, saya ikut acara pameran foto yang diadakan Polri. Kemudian ada mahasiswa Papua yang bertanya di sesi tanya jawab. Saya perhatikan ia kok bergetar, lalu saya tanya ke dia 'Adek, ada apa?'; lalu ia jawab, 'ya Ibu, begitu saya berdiri, saya bertanya, saya lihat di situ polisi, saya takut'. Jadi gitu, ada traumatik yang mereka alami," pungkas Adriana.

Sementara itu, Reno mengaku belum pernah mendapatkan perilaku diskriminatif. Namun, teman-temannya masih mengalami hal tersebut, khususnya yang terdapat di luar UI. Dirinya menceritakan sudah biasa ada yang memberikan stigma orang Papua gemar rusuh dan emosional hingga dikatakan jarang mandi serta susah untuk mendapatkan tempat tinggal atau kost. Tips untuk merespons tanggapan semacam itu adalah menjaga emosi karena orang Papua dasarnya loyal dan memiliki kebesaran hati yang tinggi, tutur Reno.

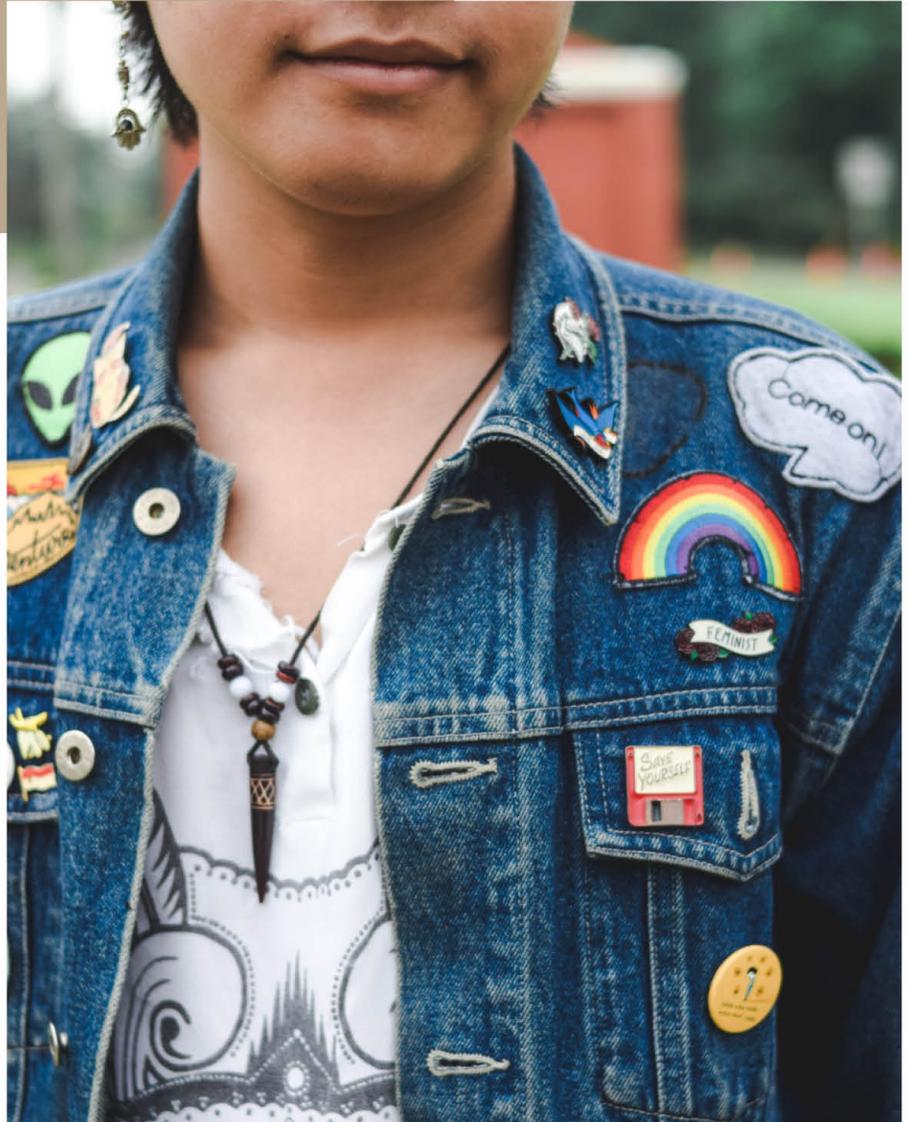
Reno berharap, UI meningkatkan toleransi antar unsur-unsurnya karena UI adalah representasi Indonesia. "Secara garis besar masih kurang, harapannya untuk UI harus jadi tempat yang nyaman tempat terbuka untuk mahasiswa, karena di Indonesia, UI itu satu-satunya kampus yang menyandang nama negara kita sehingga, harus melambangkan toleransi."

WARNA-WARNI MEREKA DI BAWAH PAYUNG UI

Reporter: Intan Eliyun, Salma Aulia,
Sekar Arum

Lima tahun silam, jagat UI dihebohkan dengan kekisruhan atas munculnya tuduhan kampanye Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dari sebuah lembaga yang menyandang nama UI di dalamnya, *Support Group and Research Center On Sexuality Studies* (SGRC) UI. SGRC UI adalah organisasi yang bergerak di bidang kajian seksualitas, reproduksi, dan orientasi seksual. Lembaga ini pun kemudian dituding mempromosikan LGBT di kalangan mahasiswa, sehingga para pengurusannya pun kemudian mendapatkan teror, baik dari orang-orang tak dikenal maupun dari pihak kampus. Tudingan demikian muncul hanya karena sebuah poster mengenai kegiatan konseling tentang seksualitas yang diadakan dengan tujuan memberi dukungan psikososial kepada para remaja LGBT—mempertimbangkan fakta bahwa kelompok LGBT seringkali termarginalisasi, didiskriminasi, dan tidak diterima oleh orang di sekitarnya. Yang terjadi kemudian adalah, pihak kampus seketika menepis adanya keterlibatan dengan organisasi tersebut. pa menunggu lama segera menyatakan bahwa SGRC sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kampus dan tidak pernah terdaftar sebagai UKM atau pusat studi.

“Dengan tegas UI menyatakan SGRC tidak berhak menggunakan nama dan logo UI pada segala bentuk aktivitasnya,” demikian bunyi rilis—cara UI berlandung



dari kecaman publik— yang dipublikasikan oleh UI melalui kanal resminya.

Fenomena di atas hanyalah seongkah batu di antara beratus bebatuan masalah yang menggerunjali jalan panjang perjuangan mereka yang “terpinggirkan”. Menjadi sebuah bagian dari kelompok minoritas merupakan tantangan tersendiri dalam hidup bermasyarakat saat ini. Mulai dari terbatasnya ruang gerak hingga harga diri yang harus terus menunduk dalam gulungan kelompok-kelompok mayoritas yang siap melemparkan cacian atau gunjingan pedas. Bahkan, keberadaan dari mereka yang ter-

gabung dari kelompok minoritas ini pun seringkali dianggap sebagai wabah yang akan menghancurkan peradaban.

Masyarakat Indonesia saat ini cenderung melihat LGBT sebagai sesuatu yang tabu dan tidak seharusnya diangkat ke ruang publik. Hal ini menyebabkan beberapa gerakan dari aktivis-aktivis mereka jarang mendapatkan dukungan publik, justru semakin dijatuhkan. Ada beberapa dari mereka yang harus menelan mentah-mentah kalimat-kalimat pedas publik dan harus tetap memasang topeng untuk mendapatkan kata aman. Seperti yang Lisa (bukan nama sebenarnya), mahasiswa

Fakultas Ilmu Budaya, terangkan. “Waktu debat bahasa Indonesia tentang isu orientasi seksual dan gender kaya gitu. Biasanya cuma gue dan teman gue yang di bagian agree gitu, sisanya mencaci maki. Tapi pada saat itu gue belum tahu, jadi apapun kata-kata yang mereka lontarin ke kita itu kerasa banget.”

Selain kata-kata pedas, mereka juga harus mendapatkan pandangan jijik dan merendahkan dari publik. “Yang pasti gue *concerned on what they perceive of me*, kaya mereka itu melihat gue sebagai apa, sebagai orang, sebagai kurang dari orang, atau apa,” tutur Lisa.

Ady, mahasiswa jurusan Filsafat Universitas Indonesia yang memiliki orientasi homoseksual, juga mengalami pengalaman yang tak jauh berbeda. Beberapa kaum mayoritas, dalam hal ini *cisheteroseksual*, memandang rendah kepadanya. Mereka berpikir bahwa kelompok LGBTQ+ tidak lebih dari orang-orang gemulai tanpa kualitas. Anggapan tersebut nyatanya hanya manifestasi dari superioritas ego belaka. Siapa sangka, justru mereka yang hidup dengan warnanya sendiri, jauh memiliki sudut pandang yang luas terhadap dunia. Beberapa bahkan mampu menempati posisi-posisi penting di lembaga, seperti Ady yang menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FIB UI. Namun begitu, jabatan ini tidak disandanginya dengan mulus begitu saja, “Yang paling terbaru itu ketika aku menjabat sebagai Wakil Ketua BEM itu banyak orang bilang ‘*Emang Ady bisa kaya gitu?*’ dan bisanya itu merujuk ke *normal identity*. Bahkan ada yang mempertanyakan ‘*Ini kalau dipandang di luar bagaimana?*’, maksud gue ya gue kerja ya kerja, identitas gue ya identitas gue, apa hubungannya. Namanya gue kerja kan dengan otak gue, ya masa gue

harus memamerkan titid gue? Kan nggak, nggak relevan di dalam pekerjaan gue, gitu loh.”

Lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI) ternyata juga masih memegang tanda tanya besar mengenai keramahan terhadap kelompok-kelompok minoritas semacam ini. Ady pun juga menerangkan bahwa hal itu sangat tergantung pada budaya yang ada di fakultas masing-masing. Memang ada kultur fakultas yang menentang dan tidak menoleransi adanya keragaman identitas gender dan seksualitas, tetapi ada pula yang cukup menerima dan lebih cenderung tidak memusingkan orientasi seksual dan seksualitas seseorang, seperti di Fakultas Ilmu Budaya.

Vernon (bukan nama sebenarnya), mahasiswa FIB UI, adalah salah satu saksi betapa menjadi minoritas tidaklah sepenuhnya berkebabun dan sendu. Sejauh ini, lingkungan kampus UI terbilang cukup suportif kepada dirinya yang memiliki orientasi seksual berbeda dari masyarakat pada umumnya. Mulai dari teman sejurusan hingga lintas jurusan yang ia kenal sangat menghormati dan menerima keadaannya. “Mereka juga *fine-fine* aja, nerima aja gitu loh kayak ya udah main pun sama siapa-pun gitu,” ujar Vernon. Karena hidup di lingkungan yang memiliki rasa toleransi cukup tinggi, sebagai bagian dari kelompok LGBT, Vernon sama sekali tidak pernah menerima tindak diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun.

Di sisi lain, ketika ditanya mengenai suportif atau tidaknya kampus terhadap komunitas LGBT, Ady menjawab, “Belum kalau mengacu ke UI secara keseluruhan. Maksud aku, aku selama ini nyaman di FIB, aku berani pacaran sama cowok ke sana kemari pegangan tangan, pacaran segala macam kaya Dilan Milea. Itu bukan

berarti FIB aman, ya karena, mau nggak mau kita stand out, kita bikin lingkungan ini aman buat kita dan itu banyak dilakukin teman-teman LGBT di kampus kita. Kita stand out tapi bukan berarti kita udah bikin lingkungan di sini aman, nggak.”

Menyadari stigma yang melekat pada kelompok LGBT, Vernon selalu menegaskan bahwa ia hanyalah seorang LGBT, bukan seorang predator seks, saat memutuskan untuk berterus terang mengenai identitasnya. “LGBT akan mencari orang yang LGBT juga untuk menjalin hubungan dan berhubungan seks, sedangkan kalau predator seks akan menyerang siapa saja dan itulah yang berbahaya,” tutur Vernon. Lebih lanjut, menurut Vernon, seharusnya masyarakat paham bahwa LGBT akan menjalin hubungan dengan sesama secara konsensual, bukan dengan sembarang orang, apalagi memaksakan kehendaknya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang *straight*.

Beberapa dari mereka ternyata tidak sedikit yang harus mengalami *internalized homophobia*, suatu kondisi di mana seseorang memilih untuk mengacuhkan bahkan membenci perasaan mereka sendiri kepada sesama jenis. Ada beberapa penyebab hal ini muncul dalam diri seseorang yang masih mencari jati dirinya, seperti tidak diberikannya pandangan yang lebih luas dan ramah terhadap kelompok LGBT dan kurangnya keramahan terhadap kelompok ini. Mereka pun yang masih menyembunyikan identitasnya, harus memilih untuk diam dan dihantui rasa ketidakpastian sepanjang waktu.

Rian (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa FIB UI, pernah mengalami fase *internalized*

homophobia yang membuatnya takut, tidak percaya diri, merasa berdosa, dan memberikan tekanan batin padanya. Rian belum terbuka mengenai orientasi seksualnya dalam upaya untuk mengatasi anggapan negatif kepada dirinya. “Di satu sisi gue pengen merdeka dengan mengekspresikan diri gue yang begini, tapi faktor eksternal kayak stigma dari masyarakat yang masih banyak salah, menghalangi gue untuk melakukan itu,” ujar Rian.

Ia khawatir akan dijauhi dan ditinggalkan apabila teman-teman sekitarnya mengetahui dirinya yang sebenarnya. Meskipun demikian, ia mengaku sudah menerima homoseksual sebagai orientasi seksualnya.

Stigma-stigma yang berkembang di masyarakat tentang kelompok LGBTQ pun juga kebanyakan mengarah ke hal-hal yang salah—salah satunya, anggapan bahwa LGBT adalah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan. Anggapan ini tidak dibenarkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) yang sudah menghapus LGBT dari daftar gangguan mental sejak empat puluh tahun silam. Kajian psikologi modern memandang homoseksualitas sebagai orientasi seksual wajar dan normal yang merupakan ekspresi yang sehat dan positif dari seksualitas manusia. Kini, standar psikoterapi yang diterapkan untuk individu dengan orientasi seksual berbeda adalah psikoterapi afirmatif, yang mendorong individu homoseksual untuk menerima orientasi seksual mereka—bukan terapi konversi, apalagi ruqyah (ritual keagamaan).

“Terapi konversi itu bukannya menyembuhin tapi justru kaya *brainwashing* gitu. Jadi efeknya emang sampai ke mentalnya, itu beneran traumatik banget kalau gue baca-baca cerita dari orang-orang yang pernah ngalamin *conversion therapy*,” tutur Lisa.

Stigma lain yang juga melekat pada kelompok LGBTQ+ adalah bahwa kelompok ini berisiko tinggi menyebarkan HIV/AIDS. Hal tersebut membuat kelompok minoritas ini dicap sebagai penyakit masyarakat yang berujung pada semakin meruncingnya kebencian terhadap kelompok LGBT. Padahal, penyebaran HIV/AIDS tidak disebabkan oleh orientasi seksual, semua orang memiliki peluang yang sama dalam penularannya apabila melakukan hubungan seksual yang tidak aman.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) tahun 2019, faktor penularan HIV/AIDS paling banyak melalui hubungan seksual dari kelompok heteroseksual, yakni sebanyak 70 persen. Sementara untuk kelompok homoseksual sebesar 22 persen, disusul oleh perinatal (2 persen), biseksual (2 persen), transfusi (2 persen), dan pengguna jarum suntik narkoba (2 persen). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa penularan HIV/AIDS dapat menjangkau semua kelompok. “Kurangnya edukasi masyarakat ini membuat mereka berburuk sangka ke kita (kelompok LGBT—red) dan dijadikan alat justifikasi kebencian terhadap kelompok LGBT,” ujar Rian.

Secara pribadi, berdasarkan pengalaman dirinya dan teman-teman kelompoknya, Vernon menyampaikan pesan mengenai bagaimana mereka ingin diperlakukan dan dianggap selayaknya manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan pengakuan dari masyarakat. Masyarakat saat ini harus mencoba untuk membuka pikiran dan melihat bahwa baik dirinya atau kelompok LGBT lainnya, juga masyarakat itu sendiri, memiliki satu persamaan—yaitu hidup sebagai manusia. “Perlakukanlah kita sama sebagai manusia, tidak peduli

pendosa, LGBT+, atau apapun itu. Kita (kelompok LGBTQ—red) bukanlah orang-orang yang akan merusak lingkungan. Kita ya sama sebagai manusia, nongkrong ya nongkrong bareng, main ya main bareng, bermasyarakat sebagaimana harusnya, ya gitu aja,” tutup Vernon.

Rian menyampaikan hal yang senada dengan Vernon. Ia berharap komunitasnya diakui keberadaannya di kehidupan sosial masyarakat. “LGBT itu cuma sekadar orientasi seksual, bukan tindak kriminal. *We’re not less human than any of you*”, tutur Rian. Ia juga berharap lingkungan kampus dapat meningkatkan pemahamannya mengenai konsep SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, Sex Characteristic), terutama untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan menciptakan ruang aman bagi kelompok LGBT.

Referensi:

Buana, A. (2018, April 26). SGRC-UI dan Penghakiman Terhadap LGBT. *tirto.id*. Retrieved October 18, 2021, from <https://tirto.id/sgrc-ui-dan-penghakiman-terhadap-lgbt-ev>.

The New York Times. (1973, December 23). The A.P.A. ruling on homosexuality. The New York Times. Retrieved October 18, 2021, from <https://www.nytimes.com/1973/12/23/archives/the-issue-is-subtle-the-debate-still-on-the-apa-ruling-on.html>.



Aku manusia biasa,

aku rakyat Indonesia biasa, aku mahasiswa UI biasa, yang sama kaya kalian dan begitu pun dengan teman-teman LGBT lainnya yang ada di sekitar kalian. Kita bukan barang eksotis, kita bukan sesuatu yang unik, tapi kita ada gitu. Yang membuat kita dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, sesuatu yang unik, karena emang budaya ignorant di dalam masyarakat kita. Hapuslah itu, biarlah kita hidup beriringan. Aku nggak bakal usik selama kamu nggak usik.

- Ady, seorang warga UI, Indonesia, dunia



BEDA WAKTU

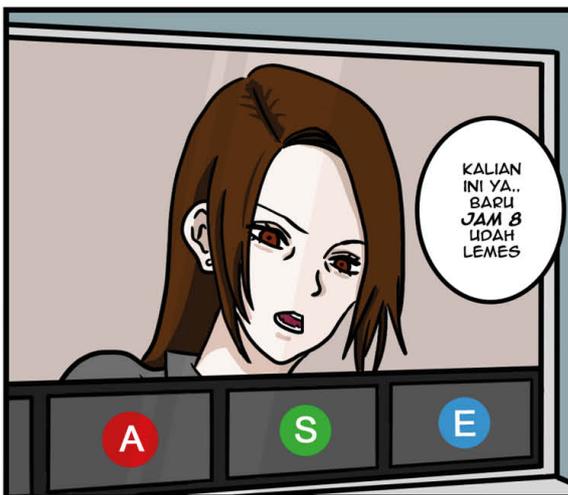




Foto: M. Faiz Mudrika



Foto: M. Faiz Mudrika



Foto: Mikail Arya



Foto: M. Faiz Mudrika



Foto: Mikail Arya



Foto: Mikail Arya

ANTARA ADA DAN TIADA: BERJUMPA DENGAN PENGANUT AGAMA MINORITAS DI KAMPUS MAKARA

Teks : Satrio Alif F,
Rifki Wahyudi dan Syifa
Nadia.

Penganut kepercayaan minoritas berada dalam situasi yang pelik di mana eksistensi kepercayaannya dipertanyakan dan rentan terhadap stigma atau diskriminasi. Dalam bukunya yang berjudul *The Nature of Prejudice*, Allport (1955) seorang tokoh psikologi sosial, mengemukakan bahwa diskriminasi seringkali berawal dari munculnya prasangka, yang kemudian berujung pada menajamnya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Prasangka tercipta sebagai cara cepat manusia untuk memahami dunia dengan cara membuat kategori-kategori tertentu. Singkatnya, lebih mudah dan cepat bagi manusia untuk menilai seseorang dari stereotipe yang melekat padanya daripada 'repot-repot' memahami perbedaan dan kompleksitas mereka secara mendalam. Masalahnya, prasangka semacam ini tidak didasarkan pada fakta, melainkan pada apa yang kita anggap benar dari keterbatasan pengalaman dan pengetahuan kita.

Kondisi demikian membuat kebanyakan penganut keper-

cayaan minoritas di UI memilih untuk diam atas kepercayaan yang dianutnya atau menyesuaikan diri. Dalam rangka membahas kondisi para mahasiswa penganut religi di UI, Suara Mahasiswa UI telah berhasil mewawancarai beberapa mahasiswa UI yang merupakan penganut kepercayaan minoritas.

Kisah Penganut Agama dengan Aliran Minoritas

Sebagai penganut aliran Syiah, Putri* pernah merasa terdiskriminasi saat mengikuti kelas Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Agama. Ia merasa tertohok ketika dalam materi kuliah yang dipelajarinya, aliran kepercayaan yang ia anut disebut sebagai aliran yang sesat. Namun, apa boleh buat, mau tidak mau ia harus mendalami kepercayaan yang diajarkandi dalam ruang kelas demi memperoleh nilai yang baik. Cukup ironis bagaimana Putri harus terpaksa menyesuaikan diri dengan materi kuliah yang sarat akan subjektivitas kelompok mayoritas. Menurut Putri, kelas MPK Agama selama ini terlalu dogmatis dan kurang memberikan ruang argumentasi.

Kisah lain datang dari seorang penganut Kristen Ortodoks. Angga*, adalah seorang minoritas berlapis, yang memandang identitas sebagai seorang murtad dari Katolik dan kini memilih untuk menganut Kristen Ortodoks. Perlu diketahui, Kekristenan terbagi menjadi bagian Timur dan Barat pada 1054. Pada masyarakat Indonesia, Kekristenan Timur seperti Ortodoks kalah populer dibandingkan Kekristenan Barat yang berbentuk Katolik dan Protestan

Keunikan dari agama yang dianutnya kerap mengundang rasa ingin tahu dari orang-orang dan tak jarang berujung pada interaksi serta diskusi lebih lanjut. Hal ini membuat Angga merasa tak segan untuk bersikap terbuka atas keper-

cayaan yang dianutnya. Kendati begitu, pada kondisi tertentu Angga memilih bersikap tertutup mengenai agamanya. Ia seringkali hanya menjawab "Kristen" atau "Katolik" saat ditanya tentang kepercayaannya, guna menghindari berbelitnya penjelasan yang harus ia berikan. Sikap tertutup yang diambilnya tersebut berdampak terhadap kebingungan orang-orang terhadap praktik doa ia lakukan.

"Kebingungan tersebut terjadi karena jawaban yang diberikan berbeda saat gue praktik berdoa gitu. Misalnya gue kalau doa bikin tanda salib seperti Katolik, akan tetapi agak berbeda karena tanda salib Kristen Ortodoks dari kiri ke kanan, [sementara] Katolik dari kanan ke kiri," cerita Angga.

Terkait dengan pemenuhan hak beragamanya, Angga merasa sudah cukup terlindungi. Namun, ia merasa kurang difasilitasi oleh UI — masih belum ada wadah yang dapat menaungi agama yang ia anut. Di lingkungan UI, menurutnya, wadah agama yang paling mendekati adalah Persekutuan Oikumene (PO) yang ditujukan untuk mewadahi mahasiswa penganut agama Kristen Protestan. Ketiadaan wadah bagi agama minoritas ini hanya menyisakan dua pilihan bagi para penganutnya: melebur dengan wadah agama lain yang serupa, atau sama sekali tidak terwadahi.

Sementara itu, ada pula Bayu Muhammad, yang terlahir dengan identitas muslim dan kini juga menganut aliran Deisme. Aliran Deisme menekankan bahwa kehadiran agama dan Tuhan adalah fenomena alamiah. Bagi Bayu, Deisme berfungsi sebagai pondasi yang lebih kokoh untuk beragama dan bertuhan ketimbang dari apa yang lazimnya diajarkan secara dogmatis.

“Jadi, *somehow*, *gue* ngelihatnya agama itu masih menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan juga demikian. Makanya, di sudut pandang Deisme, tidak melihat bahwa kebutuhan akan agama dan Tuhan itu *taken for granted*. Kita melihat bahwa terdapat alasan yang lebih alamiah, bisa dijelaskan secara rasional, mengapa kita membutuhkan [agama],” tutur Bayu, ia kemudian melanjutkan, “Karena alam semesta ini nggak selamanya empiris. Ada banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh panca indera manusia, makanya kita memutuskan untuk menjawab menggunakan agama dan juga Tuhan,”

Sejauh ini, Bayu tidak mengalami perlakuan negatif atas keyakinan yang dianutnya. Ia bersikap terbuka atas kepercayaannya kepada teman-temannya, “Temen-temen *gue* semuanya paham, *gue* memandang ketuhanan dari keagamaan *gue* itu seperti apa,” ujarnya.

Kisah Mereka yang Tidak Menganut Kepercayaan

Untuk menjaring pengalaman mahasiswa UI mengenai kepercayaan yang mereka anut, kami menyebarkan survei mengenai Keragaman Kepercayaan dan Aliran Kepercayaan Mahasiswa UI. Dari 53 responden yang mengisi survei tersebut, 44,4 persen di antaranya mengaku tidak menganut kepercayaan. Angka ini tentunya tidak sepele, terutama jika mengingat bahwa mereka yang termasuk dalam populasi ini pada umumnya hanya dapat bergerak di bawah radar dan, mungkin, setiap saat dibayang-bayangi penolakan. Apakah lingkungan kampus sudah cukup aman bagi mereka yang memilih untuk tidak “percaya”?

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden (53%) merasa belum terjamin oleh UI terkait kebebasan dalam tidak

menganut kepercayaan. “Syarat wajib mata kuliah aja harus ada MPK Agama, kalau yang ga percaya dengan Tuhan atau agama agak aneh aja ngambilnya. Untung karena fakultas dan jurusan juga bisa milih ngambilnya bebas, tapi rumornya kan harus ngambil sesuai yang ada di KTP dan diintimidasi sama orang administrasi,” demikian ungkapan salah seorang responden survei. Sementara itu, responden lain menyatakan harapannya bagi UI untuk mengadakan kolom non theis dalam identitas mahasiswa serta komunitas yang dapat menaungi proses pencarian identitas spiritual mahasiswa.

Kami berkesempatan mewawancarai beberapa mahasiswa UI yang tidak mengikatkan diri pada agama tertentu, salah satunya adalah Salsa*. Salsa sudah menyadari sejak masih belia bahwa dirinya tidak merasakan keterikatan emosional dengan agama yang diberikan kepadanya sejak lahir. Melalui refleksi yang panjang, Salsa akhirnya tiba pada di satu titik di mana dia menyatakan diri sebagai agnostik. “*Gue* merasa lingkungan pertemanan di UI tuh cukup *open-minded* dan menerima. *Gue* nggak merasa terancam sih di sini. Kalo yang masih diskriminatif, kayanya perlu untuk banyak piknik, banyak baca, ketemu dan diskusi sama orang,” ungkapnya.

Sementara itu, di sisi lain UI ada Agung* yang juga merupakan seorang atheis. Lahir dari keluarga yang religius dan menempuh pendidikan di sekolah agama tidak membuat Agung menerima begitu saja apa yang telah diwariskan keluarga perihal agama dan ketuhanan. Muncul pertanyaan-pertanyaan ulang terkait apa yang sejauh ini ia yakini.

“Semakin paham aku sama yang dimaksud di dalam dalil Al Qur’an atau Hadits, kok malah semakin banyak pertanyaan

yang muncul, dan semakin gak cocok. Tiap aku tanya sama dosen-dosen, jawabannya pasti muncul pertanyaan lain di pikiranku, dan pertanyaan itu pasti kesimpulannya melenceng dari keyakinan Islam maupun agama Samawi lain. Di situ-lah aku mulai ragu,” terangnya.

Sejauh ini, Agung menutupi kondisi keagamaannya yang sebenarnya. Nama santri yang melekat pada dirinya membuat orang mengidentifikasi Agung sebagai sosok yang taat terhadap agama yang ia anut dulu.

Meneropong lebih dalam pada esensi agama, kita sesungguhnya dapat melihat agama sebagai sebuah entitas yang menjunjung tinggi nilai toleransi, alih-alih sebagai identitas yang memfasilitasi segregasi. Bayu berpesan,

“

Kita kurang jujur pada fakta bahwa agama itu selain ilahiah, dia juga sangat manusiawi. Dalam artian, selain mengatur kehidupan yang berkaitan dengan surga dan neraka, agama juga mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita di bumi antara manusia,

”

ia kemudian menutup pesannya dengan ayat dari Alkitab: “Kasihilah Tuhan Allah-mu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!” (bdk. Matius 22: 37,39)

Keterangan: nama yang diberi tanda bintang () merupakan nama samaran.*

Referensi

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

MELIHAT DENGAN SUARA: CERITA KAWAN-KAWAN DISABILITAS NETRA UI

Teks: M. Luthfi Sadra

Universitas Indonesia (UI) adalah lingkungan heterogen tempat beragam kelompok beraktivitas, salah satunya adalah kelompok disabilitas netra. Sebagai lembaga pendidikan, sudah sewajarnya UI berusaha mewujudkan lingkungan inklusif yang ramah untuk setiap kelompok. Di kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya kuliah tatap muka, para mahasiswa—termasuk kelompok disabilitas netra—menghadapi hal baru.

Sudah tiga semester lamanya Raditya, Fauzi, dan David menjadi mahasiswa UI. Selama itu pula mereka jalani secara daring. Namun, sebagai disabilitas netra, ada beberapa hal yang kerap kali mengganjal. Mereka mengaku masih kebingungan, misalnya saat mengerjakan tugas atau ujian, karena tidak adanya SOP untuk disabilitas netra yang dibuat oleh kampus. Hal ini mengingat mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mayoritas mahasiswa lainnya.

Dalam melakukan aktivitas pembelajaran di UI, mereka menggunakan aplikasi *screen reader* di *smartphone*-nya. *Screen reader* adalah aplikasi untuk membantu disabilitas netra dan disleksia untuk membaca tulisan di layar komputer.

Screen reader mengolah teks menjadi suara, sehingga teks dapat didengar oleh pengguna *smartphone*.

Fauzi, yang berasal dari FH UI, menuturkan pandangannya akan hal ini, “Seharusnya ada semacam SOP-nya, harus ada peraturan internal yang menaungi hal tersebut, misalnya dari awal sudah ada peraturan internal seperti itu, jadi ya nggak bingung lagi kira-kira bakal seperti apa ujian, tugas, KBM-nya (Kegiatan Belajar Mengajar—red),” ujar Fauzi. Mereka masih harus menghubungi dosen ketika akan mengerjakan tugas karena ketidakjelasan seperti itu. Sebagai mahasiswa Sastra Arab, Raditya diberikan perlakuan berbeda saat praktik membaca aksara Arab, itu pun harus dibicarakan dengan dosen karena tidak ada SOP yang mengatur pasti hal tersebut.

Selain tidak adanya SOP, UI juga tidak memiliki program layanan untuk disabilitas. Sebenarnya pada tahun 2018–2019 lalu, UI memiliki Unit Pelayanan Disabilitas (UPD), sayangnya program tersebut tidak bertahan lama dan sampai sekarang belum ada kejelasannya. Di Indonesia sendiri, perguruan tinggi yang memiliki UPD salah satunya adalah Universitas Brawijaya dan UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Mereka memi-

liki unit pelayanan yang secara langsung berada di bawah rektorat. Berbeda dengan di UI, UPD yang pernah ada tersebut masih berbentuk kontrak, dimana kontrak tersebut berjalan dua tahun terhitung mulai Januari tahun 2018 sampai Desember tahun 2019. Selain itu, unit tersebut juga masih berbentuk otonom dan dasar hukumnya juga kurang kuat, sehingga unit tersebut tidak bertahan lama.

UPD di UI merupakan hasil kerja sama antara FKM UI dan Direktorat Kemahasiswaan UI. Tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan yang inklusif bagi setiap kalangan. Layanan ini menyediakan bantuan bagi para disabilitas di UI seperti bantuan perangkat penunjang kepada yang memerlukan, pembekalan *skill*, dukungan dan motivasi, serta forum reguler.

Layanan ini juga memberikan formulir yang mengakomodasikan beberapa macam disabilitas, seperti buta/buta sebagian, buta warna, tuli/gangguan pendengaran, pengguna kursi roda/hambatan mobilitas, gangguan kesehatan mental, disabilitas yang tidak tampak (seperti epilepsi), gangguan spektrum autisme, gangguan belajar khusus (seperti disleksia), serta kolom untuk menuliskan macam disabilitas lainnya.



Namun, unggahan terakhir yang muncul di situs resminya, yaitu disability.ui.ac.id, adalah unggahan tahun 2019—dua tahun lalu. Tidak pula ada bentuk advokasi dari UPD UI yang sampai pada Raditya, David, dan Fauzi.

Untuk KBM kelas daring, mereka bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain. Namun, mahasiswa disabilitas netra akan lebih mengandalkan *screen reader* seperti untuk membaca *Power Point* yang ditampilkan. Mereka juga jadi lebih memperhatikan ucapan dosen dan lebih mengadakan pendengarannya.

Selain tentang penugasan, hal lain yang cukup merepotkan adalah perihal administrasi, seperti saat mengisi IRS. *Screen reader* yang mereka andalkan sering kesulitan untuk membaca tulisan di web SIAK, “Ini kalo kita buka SIAK kadang-kadang nggak *accessible* untuk pengguna *screen reader*. Gua 3 semester ini selaludi-SIAK-in (diisikani IRS-nya—red),” kata Fauzi, ketika ditanya tentang masalah administrasinya selama ini.

Terlepas dari kurangnya terpegunuhnya beberapa hal, menyoal kehidupan sosial di kampus,

David mengatakan bahwa teman-teman di UI bersikap terbuka dan suportif terhadap keadaan mereka, walaupun belum banyak kawan yang ia temui secara langsung. Sayangnya, pandangan masyarakat secara umum tidak sebaik di lingkungan UI. David bercerita, ia pernah mencoba membuat akun *mobile banking*, tetapi tidak diperbolehkan oleh bank terkait karena khawatir bisa disalahgunakan.

“Kata *customer service*-nya tuh—ini dia nanya ke orang tua gue—‘Bu, ini anaknya disabilitas ya?’. Terus dia izin ke bosnya dulu, pas balik lagi dia bilang, ‘Maaf, kalau di sini, tidak boleh disabilitas bikin *m-banking*, takutnya disalahgunakan atau gimana,’” tutur David. Padahal, kawan-kawan disabilitas netra juga bisa menggunakan *smartphone* seperti orang lain.

“MAAF, KALAU DI SINI, TIDAK BOLEH DISABILITAS BIKIN M-BANKING, TAKUTNYA DISALAHGUNAKAN ATAU GIMANA”

Hal lain yang disayangkan adalah masih adanya orang yang memandang kaum disabilitas sebagai objek belaka. Layaknya suatu batu loncatan untuk “menyukuri” hidup. Seperti, pada seminar motivasi yang sering menampilkan orang dengan disabilitas lalu memutar lagu-lagu sedih, supaya peserta seminar “bersyukur” akan keadaannya. Hal seperti itu justru membuat mereka merasa tidak nyaman.

“Gua nggak nyaman kalo ada yang bilang, ‘Wah ini buat jadi buat jadi bahan kasihan’, terus disuruh ngisi (acara—red), dikasih lagu-lagu kasihan. Itu masih sering terjadi. Ya, kadang-kadang gua protes kalo udah gitu,” keluh Fauzi.

Mereka memaknai kondisi mereka juga sebagai peluang, misalnya dengan adanya kebijakan pemerintah yang mulai memperhatikan hak-hak kaum disabilitas. Dengan adanya UU nomor 8 tahun 2016, contohnya saja, kaum disabilitas mendapatkan minimal kuota 2% dalam suatu perusahaan. Mereka menyikapi privilese tersebut sebagai sebuah peluang. Selain itu, ada juga CPNS dan banyak beasiswa seperti LPDP maupun swasta yang dikhususkan kaum disabilitas.

Selain itu, lingkungan UI dapat dikatakan sudah mendukung untuk berkembang. Merunut pernyataan Fauzi, di FH, berbagai fasilitas sudah dapat terakses, “*No one left behind* gitu lah ya prinsipnya di FH,” ujarnya. David dan Raditya juga meatakan bahwa sivitas akademika UI di sekelilingnya terbuka terhadap keadaan mereka.

Masyarakat dan pemerintah selama ini memandang disabilitas sebagai kaum yang perlu dikasihani dan diberi santunan, seolah mereka adalah objek. Namun, yang sebenarnya mereka perlukan adalah diberikannya peluang dan kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi. Mereka menginginkan agar sistem dapat mengakomodir dan diakses oleh kaum disabilitas. “Kita lebih menuntut untuk sistem itu sudah mengakomodir, atau sistem itu sudah *accessible* belum buat penyandang disabilitas,” tambah Fauzi.



STIGMA DISKRIMINATIF DAN LABEL POLITIK TERSEMAT DI PAKAIAN MEREKA

Teks : Arnetta Nandy

Tarbiyah merupakan kosakata yang tak asing bagi mereka yang mengetahui eksistensi kelompok ini. Jika dimaknai secara etimologis, tarbiyah artinya pendidikan. Anggota kelompok ini kerap diidentikkan dengan atribut-atribut Islam, seperti jilbab panjang dan celana cingkrang.

Kelompok ini juga akrab dicap sebagai kelompok ekstrem atau penganut Islam garis keras, hingga dikonstruksikan dengan gerakan-gerakan radikal dan

agenda politik tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kelompok tarbiyah di kampus mendapat label yang lebih menakutkan lagi: ISIS, Taliban, bahkan teroris.

Selayang Pandang Gerakan Tarbiyah di Indonesia

Sejarah tarbiyah sendiri dipengaruhi oleh pergerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. IM sebagai gerakan Islam transnasional ini dibawa oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Jazirah Arab. Dari sejarahnya,

IM memiliki keterikatan dengan petinggi politik Indonesia pascakemerdekaan. Sebab, IM merupakan kelompok pertama yang mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Dalam disertasi Abdurakhman (2013), dosen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, yang berjudul Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional gerakan tarbiyah mulai terlihat eksistensinya di Indonesia saat terjadi restrukturisasi

politik yang ditetapkan pemerintah Orde Baru (Orba). Restrukturisasi ini menentang segala bentuk politik di luar negara, Soeharto, dan Partai Golkar, termasuk politik keislaman yang dilabeli dengan “ekstrim kanan”. Mengambil Damanik (2003) dalam Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia melalui disertasi yang sama, aktivitas Gerakan Tarbiyah ini akhirnya bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kekecewaan terhadap Orde Baru ini tidak berhenti sampai kepada munculnya gerakan baru. Kekuatan lama seperti Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) juga turut bangkit meskipun dilarang untuk muncul. Mohammad Natsir, pendiri sekaligus pemimpin Masyumi, akhirnya berinisiasi untuk berpolitik melalui jalur dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dengan DDII, Natsir memiliki misi membangun generasi muda di kampus sebagai pemimpin Islam di masa depan melalui pengkaderan. Mereka direkrut melalui koordinasi organisasi tempat mereka bernaung, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), atau Muhammadiyah.

Kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) besutan pemerintah Orba juga menjadi ladang gerakan tarbiyah berkembang di berbagai kampus. Pasalnya, kebijakan ini menekan organisasi intra kampus untuk tidak berpolitik praktis, tetapi tidak menjamah organisasi ekstra kampus seperti HMI dan PII. Hal ini dimanfaatkan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) untuk berdakwah dan mengadakan kajian keislaman.

Tarbiyah dan Politik Kampus: Stereotip yang Selalu Menghantui

Lala (nama samaran) adalah seorang mahasiswi salah satu fakultas di UI. Sehari-hari ia mengenakan kerudung yang cenderung lebih panjang—kiranya, panjangnya hingga menutup dada. Sejak masa mahasiswa baru, ia sudah mengikuti kegiatan kelompok ini. Pun begitu, lingkup pertemanannya cukup luas, dalam arti ia tidak membatasi pergaulannya pada teman-teman organisasinya saja.

Di UI, kegiatan tarbiyah erat kaitannya dengan liqo, yaitu kajian yang dilakukan seminggu sekali atau yang sering dikenal sebagai mentoring. Terdapat pula murobbi atau mentor dan mutarrobbi atau mentee. “Temen-temen yang mendapatkan pembinaan sepekan sekali rutin. Ada yang jadi pesertanya (mentee—red) atau mentor, cuma landasannya ya itu value-value Islam,” ujarnya.

Di lain sisi, banyak anggapan yang menganggap kegiatan kelompok tarbiyah terfokus pada kegiatan politik. Melansir pernyataan Ade Armando di *Suara.com*, dosen Ilmu Komunikasi UI, gerakan tarbiyah di UI diimplementasikan dalam organisasi Nuansa Islam (Salam) UI. Selain itu, menurut Budi (nama samaran), gerakan ini juga menjadi akar pada organisasi seperti Rumah Kepemimpinan (RK) UI dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UI.

Kelompok tarbiyah dilihat sebagai kelompok bertujuan membaaur dalam organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Mereka ulang wawancara kami

dengan Aldy, mahasiswa FIB UI, memaparkan ulang asumsi ini, “Gerakan politiknya (tarbiyah—red) itu punya kecenderungan untuk punya kuasa gitu, lho, di seluruh kampus bahwa untuk memastikan suara-suara kaum Muslim itu terdengar di segala berbagai macam lembaga. Makanya nanti kalau dari tarbiyah biasanya nanti masuk ke BEM (atau—red) DPM,” ujarnya.

Sama seperti Aldy, Budi juga mengamini pandangan bahwa eksistensi kelompok ini nyata dalam dunia perpolitikan kampus, walau ia menekankan bahwa keterlibatan ini tidak dapat digeneralisasi. “Walaupun nggak semua yang terlibat dalam kelompok tarbiyah berpolitik praktis nggak bisa dipungkiri kalau mereka punya keterlibatan atau ambisi tinggi dalam politik kampus.”

Pandangan-pandangan ini memunculkan stigma negatif bahwa anggota kelompok tarbiyah merupakan orang-orang agamis yang berpolitik dan haus akan jabatan. Namun, anggapan ini agak melenceng. Riska (nama samaran), seorang mahasiswi yang mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompok ini juga ikut angkat bicara, “Nggak (semua kegiatan kelompok tarbiyah itu politis—red). Aku anaknya nggak berani soal politik-politik (...) aku beda sama temen aku yang emang mereka tuh belajar agama banget, terus buat nyemplung ke arah sana (politik—red) tuh ada juga, sedangkan aku nggak ke sana,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Lala menegaskan bahwa politik praktis sebenarnya tidak bisa mutlak diasosiasikan sebagai aktivitas tarbiyah. Bagi Lala, tujuan kelompok tarbiyah bukanlah berkencan di bidang politik

kampus. “Kelompoknya sebenarnya itu tadi lebih ke penjagaannya (keimanan—red) aja kan, dengan cara menjaga satu sama lainnya. Karena kalau dalam Islam, keimanan itu dijaga. Dan penjaganya itu bukan hanya datang dari diri sendiri, tapi juga dari saling mengingatkan, itu yang dituangkan dalam bentuk kelompok-kelompok pekanan.”

Mengenai anggapan bahwa kelompok tarbiyah sangat mengikat kaderisasi anggotanya, Lala tidak merasa demikian. “Pertemuan pekanan yang diikuti sifatnya ini ya nggak mengekang dan sangat boleh seseorang bisa keluar masuk—jadi kalau yang bener (bilang—red) ekstrem, itu aku bingung ekstremnya di mana.”

Ruang Aman Bagi Mereka yang Diberi Label

Keberagaman merupakan suatu hal yang wajar, apalagi di lingkungan multikultural seperti UI. Keberadaan mereka yang diberi label ini memang menuai pro dan kontra, tetapi apakah UI sudah menjadi ruang yang aman bagi perbedaan pemikiran semacam ini? Terlebih, kelompok tarbiyah kerap kali disisihkan karena tampilannya. Perempuan yang mengenakan jilbab panjang maupun cadar rawan digoda dengan ujaran-ujaran tidak menyenangkan, semisal “bawa bom” maupun “bau badan”. Hal ini terjadi pula pada laki-laki yang bercelana cingkrang dan berjenggot.

Sebagai perempuan yang kesehariannya menggunakan cadar, Riska merasa dirinya sudah cukup aman di UI, terutama fakultasnya sendiri. “Kalau dibilang aman, nggak juga. Tapi kalau dibilang nggak aman, lumayan aman—kalau dari

teman-teman aku sendiri nggak (mendiskriminasi—red) justru mereka lebih alhamdulillahnya kayak beda ya, ‘Oh ada ya (mahasiswa bercadar—red),’ ujar Riska. Selain itu, perlakuan dari tenaga pendidik, ia mengaku pernah mendapat suatu pertanyaan terkait cadarnya, “Beliau bilang, ‘Itu kayaknya yang di depan mulut (cadar—red) ngalangin kamu ngomong, nggak?’” ujar mahasiswa tingkat akhir tersebut. Namun, ia tetap berpikir positif bahwa mungkin saja tenaga pendidik itu bertanya karena tidak terlalu mengeriti.

Sayangnya, tidak seperti dengan Riska yang tidak pernah mendapat diskriminasi secara disengaja, Lala menyatakan ia pernah mendapat diskriminasi oleh orang-orang di lingkungannya. “Aku awal maba (mahasiswa baru—red)—tingkat satu mau masuk tingkat dua—mungkin agak kesel ya, karena waktu di masa-masa itu aku pernah di-*offense* secara langsung ya lewat (aplikasi—red) Line. Menurut aku apa ya, perkataannya itu kurang mengenakkan,” ceritanya. Tentunya pengalaman tersebut masih membekas hingga kini. Tidak sepantasnya juga ia mendapat diskriminasi karena pilihannya.

Pesan dari Mereka yang Diberi Label

Meskipun Riska tidak pernah mendapat diskriminasi langsung di UI, ia tetap merasa marah bila kelompoknya kerap disandingkan dengan kelompok radikal. “Kita sama-sama mahasiswa, cuma ya, ya penampilan kita aja yang lebih mungkin beda dari teman-teman, kita lebih mencoba untuk menjadi memenuhi kriteria apa yang kita yakini,” ujar Riska.

Sama halnya dengan Riska, Lala juga kurang nyaman dengan pelabelan yang diberikan pada kelompoknya. Terlebih, label sebagai kelompok yang fokus pada tujuan politik semata. “Kenapa yang menjadi fokus itu di bagian politik praktisnya? Padahal, sebenarnya apa yang kita lakukan di luar politik praktis itu lebih banyak, kayak kajian-kajian terkait fiqih, kita belajar baca Quran. Di situ situ kita ada juga penjaan ibadah harian,” tuturnya.

Lebih dari itu, kegiatan mentoring pun tidak dilakukan hanya untuk kaderisasi semata. “Kita diskusi tentang studi lanjutan, pascakampus, bahkan kita punya mentor-mentor alumni, alumni-alumni untuk nanti (membimbing kegiatan—red) pascakampusnya,” sambung Lala.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia kampus, khususnya UI, merupakan tempat berbagai persepsi, ideologi politik, dan perbedaan pendapat berkumpul. Kelompok tarbiyah, sebagai salah satu kelompok yang eksis, tentunya punya hak berkumpul dan berorganisasi sesuai nilai yang mereka yakini. Sayangnya, pihak yang memberi label dan perlakuan buruk pada kelompok ini adalah pihak-pihak yang terkenal—serta kerap menyuarakan—kebebasan berpendapat dan berpikiran terbuka. Pun, banyak anggapan bahwa kelompok tarbiyah adalah kelompok intoleran. Pertanyaannya, apakah menyerang suatu kelompok karena pilihan religiusnya merupakan hal yang toleran?.

TANDA TANYA SERTA LUKA DALAM PLURALISME KITA

Teks: Putri Melina



JUDUL FILM: ? (JUGA DIKENAL SEBAGAI TANDA TANYA)
SUTRADARA: HANUNG BRAMANTYO
PRODUSER: CELERINA JUDISARI DAN HANUNG BRAMANTYO
GENRE: DRAMA
TAHUN RILIS: 7 APRIL 2011
DURASI: 100 MENIT
PEMAIN: REVALINA S. TEMAT, REZA RAHADIAN, AGUS KUNCORO, ENDHITA, RIO DEWANTO, DAN HENKY SOLAIMAN

Satu dekade lalu, seorang sutradara kenamaan Indonesia, Hanung Bramantyo, membuat sebuah film yang dapat menjadi pengingat bagi kita bersama akan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tanda Tanya dihadirkan Hanung Bramantyo dari sebuah luka yang terjadi 20 tahun lalu, bom malam Natal di Gereja Eben Haezer, Mojokerto. Riyanto merupakan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) yang meninggal dunia karena ledakan bom saat bertugas mengamankan malam Natal 24 Desember 2000. Dalam konteks GP Ansor, Riyanto merupakan sosok ideal yang mampu melaksanakan tugas. Atas pengorbanannya malam itu, sebelas tahun setelah peristiwa, pada tahun 2011 Hanung Bramantyo merilis Tanda Tanya.

Film Tanda Tanya menceritakan tiga keluarga yang berhadapan dengan berbagai konflik etnis dan agama di sekitar mereka, salah satunya dialami keluarga Tan Kat Sun (Henky Solaiman). Keluarga beretnis Tionghoa dan beragama Buddha ini menghadapi masalah dengan masyarakat sekitar karena mereka mengelola rumah makan masakan Tionghoa dengan menu daging babi. Sun selalu memastikan agar pegawainya menggunakan peralatan khusus saat memasak. Akan tetapi, masih saja calon pelanggan yang beragama Muslim

meragukan masakan Sun dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan setelah Sun menjamin kehalalan masakannya.

Selain menampilkan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa, film ini juga menyampaikan kebingungan seorang wanita yang memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Rika (Endhita) menceritakan bagaimana orang-orang di sekitarnya menyudutkan dirinya karena keputusan tersebut. Rika berusaha menjelaskan kepada orang sekitarnya tentang langkah besar yang diambilnya.

Rika yang baru saja memeluk agama Kristen kerap hadir di acara-acara gereja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam film ini, dikisahkan Rika menghadiri acara malam Natal di gereja dan sebuah bom sengaja diletakkan dekat bangku jemaat oleh seseorang. Namun, seorang petugas keamanan bernama Soleh (Reza Rahadian) berhasil mengamankan bom tersebut dan menyelamatkan jemaat yang sedang melakukan ibadah. Akan tetapi, bom tersebut meledak dalam pelukannya.

Tanda Tanya berpesan bahwa apa pun agama dan etnis yang dimiliki seseorang, sebagai manusia kita diminta untuk menghormati dan menolong satu

sama lain. Sepatutnya, peristiwa ledakan bom malam Natal di Gereja Eben Haezer yang diabadikan menjadi cerita dalam film Tanda Tanya makin menyadarkan keberagaman latar belakang di Indonesia.

Konflik-konflik menarik dan sangat dekat dengan realitas kehidupan yang tertuang dalam Tanda Tanya berhasil mengantarkan film ini mendapatkan sembilan nominasi di Festival Film Indonesia pada 2011 dan memenangkan Piala Citra untuk Sinematografi Terbaik. Meskipun memborong banyak penghargaan, film ini menimbulkan sejumlah kontroversi. Sebuah organisasi masyarakat sempat mengecam keras peredaran film Tanda Tanya. Film ini dianggap liberal dan tidak sesuai dengan pandangan ormas tersebut. Selain itu, organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) juga menentang film ini akibat pesan pluralismenya. Banser, sayap pemuda NU, mengecam film ini karena adanya adegan yang menyangkan anggota Banser dibayar untuk melakukan tugas-tugas amal mereka. Mereka bersikeras bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, Tanda Tanya diharapkan menjadi pengingat bahwa masyarakat Indonesia berasal dari suku, etnis, dan agama yang beragam. Menghormati pilihan dan hak asasi satu sama lain adalah sebuah keharusan. Selain itu, kejadian bom di tempat ibadah dan penghinaan antaretnis sudah sepatutnya tidak akan pernah terjadi lagi.

QUEERING CARE: ALTERNATIF MELAMPAUI SEKAT-SEKAT KASIH KONVENSIONAL

Teks : F. Abimanyu, FIB UI

Beberapa bulan yang lalu, salah satu sahabat saya mengalami kekerasan domestik dari orang tua dan saudari kandungnya — yang merupakan Muslim konservatif — karena ia memutuskan untuk berhenti menggunakan hijab. Ini berujung pada situasi genting di mana sahabat saya mengalami trauma berat sehingga terpaksa harus kabur dari rumah dan tinggal di rumah aman, dibantu bersama saya dan beberapa sahabat lainnya. Perjuangan untuk membebaskan diri tersebut sempat sangat sulit karena dipenuhi dengan berbagai kekerasan dan ancaman dari sana-sini yang dihadapi olehnya dan kami sebagai kawan dekatnya (Keluarga sahabat kami bahkan sudah melabel kami sebagai “pengaruh buruk” dan sempat menengancam salah satu dari kami).

Kendati demikian, setelah sahabat kami berhasil mencapai rumah aman, segala perjalanan itu membuat kami sadar betapa kami — anak-anak dari kelas menengah ke bawah yang terombang-ambing kesulitan finansial selama pandemi, yang *queer*, menganut kepercayaan-kepercayaan minoritas, memiliki disabilitas mental — sangat terikat dengan satu sama lain dalam ketertindasan dan ancaman sistemik yang mungkin menerpa siapapun dari kami, betapa kami harus senantiasa ada untuk satu sama lain setiap saat, dan betapa kami sangat mengasihi dan bersyukur atas keberadaan satu sama lain di atas ruang lingkup sosial lainnya.

Melalui rangkaian peristiwa ini, saya teringat wacana *Queering care* yang dielaborasi oleh Kimberley Dibben. Apa itu

Queering care? Apakah ini artinya relasi kasih yang eksklusif antar orang-orang LGBTQ+? Tentu saja tidak. Dibben menggunakan istilah *Queering care* untuk merujuk kepada bentuk kasih sayang komunitas yang radikal. Ini dapat termanifestasikan dalam bentuk-bentuk relasi yang membangun dan memprioritaskan persahabatan, melampaui batas-batas kekerabatan yang normatif, mengutamakan keintiman kolektif di bandingkan individualisme, serta mendukung dan mewartakan kepentingan tiap-tiap individu secara komunal. *Queering care* juga berarti membangun relasi kasih sayang komunal yang cair; yang senantiasa dibentuk dan beradaptasi untuk tiap-tiap orang di dalamnya. Terpenting, *Queering care* ditujukan untuk melindungi, merawat dan mengangkat suara mereka yang selama ini

ditindas dan ditelantarkan oleh sistem.

Sistem neoliberal saat ini ditopang oleh individualisme serta logika patriarkal-heteronormatif yang secara konstan menindas dan menelantarkan mereka di marjin — rakyat miskin, buruh, petani, masyarakat adat, penganut kepercayaan minoritas, mereka dengan disabilitas — serta mendorong krisis ekologis yang menghancurkan planet kita. Oleh karena itu, Dibben memandang komunitas sebagai instrumen radikal untuk merawat dan mengasahi mereka yang ditelantarkan oleh negara dan diinjak-injak oleh sistem. Kasih sayang dan perawatan komunitas juga merupakan alternatif dari bentuk keluarga nuklir konvensional yang telah menjadi pelayan sistem berwatak kapitalis dan kolonial, serta memaksakan patriarki dan heteronormativitas melalui apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai ketahanan keluarga”.

Menurut Dibben, selain menyediakan tenaga kerja yang lebih efisien bagi moda produksi kapitalistis, keluarga nuklir juga menghilangkan tanggung jawab negara untuk menyejahterakan rakyatnya dan menyerahkannya kepada tiap tiap rumah tangga. Perempuan disubjugasikan untuk mengelola kerja-kerja reproduktif dan perawatan di rumah, sementara orang-orang *queer* terasingkan. Mereka yang tidak dapat berkompetisi dalam sistem kapitalistis ini juga segera terbuang dan terpinggirkan. Karena logika kapitalistis ini, manusia dinilai melalui produktivitas dan kebergunaannya bagi akumulasi kapital. Rumah tangga yang seharusnya menjadi pusat perawatan dan kasih sayang digerogeti oleh dehumanisasi berdasarkan kapital dan relasi kuasa yang timpang.

Kita semua memerlukan bentuk kasih sayang yang lebih radikal lagi dan melampaui batas-batas ini. Kita harus mendefinisikan ulang makna ruang keluarga, kekerabatan, komunitas dan kasih sayang di dalamnya.

Baru-baru ini sempat ada keributan di Twitter ketika warganet ramai-ramai menghujat seseorang karena menitipkan orang tuanya ke panti jompo, tanpa mengetahui konteks atau alasan dibalikinya. Saya rasa yang bisa dilihat dari fenomena ini adalah jelas: ada kesalahan dengan bagaimana masyarakat kita sangat terobsesi dengan konsepsi kewajiban “kasih sayang” tradisional sehingga seringkali menghiraukan fakta bahwa kewajiban tersebut juga bisa dipenuhi bersama oleh kepedulian kolektif dari siapapun: teman, tetangga, komunitas, atau bahkan orang asing! Mengapa kasih sayang “keluarga” (dalam arti biologis sempit) harus dipertentangkan dengan kasih sayang komunal dari luar keluarga, seakan-akan yang baik dan ideal hanya jika bersama keluarga dan di luarnya adalah sesat? Kita sering melihat bagaimana seorang anak yang dititipkan di *daycare* karena orang tuanya harus bekerja dianggap “ditelantarkan”. Seorang anak yang lebih nyaman berada bersama teman-temannya dianggap “terjerumus pergaulan bebas”. Orang tua yang dititipkan di panti jompo juga dianggap “ditinggalkan”. Mengapa harus demikian? Selama individu masih memiliki agensi, bisa sama bahagia dan dikasahi, bisa memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya, apa salahnya?

Kita harus mulai menyadari bahwa keluarga nuklir tidak selalu sempurna — banyak kekerasan dan ketertindasan in-

dividu yang dapat terjadi di dalamnya, khususnya bagi mereka dengan identitas terpinggirkan. Kita harus mulai memandang kasih sayang dan perawatan komunitas di luar kekerabatan darah sebagai sama valid dan bernilai, khususnya bagi mereka di marjin yang sangat membutuhkan ruang untuk terbebaskan dan tumbuh di luar sekat-sekat masyarakat normatif. Bahkan, kasih sayang ini mungkin melampaui konsepsi kasih sayang yang dulu kita kenal — dengan *Queering care*, kita juga dimungkinkan untuk memulai praksis politik yang radikal dan revolusioner untuk pembebasan kaum tertindas.

Revolusi dimulai dari rumah — kita perlu mengentas pemisahan kapitalis akan yang publik dan privat, dan menolak konsepsi privilese borjuis akan “kehidupan pribadi yang apolitis”. Lantas, kita membangun kekuatan politik dari menyediakan ruang aman untuk kawan-kawan kita supaya tumbuh bersama, saling mengasahi, menjaga, merawat dan mempraktikkan alternatif-alternatif kecil kita di dalamnya sebagai tandingan bagi mesin penindas negara dan kapital. “Melalui komunitas, kamerad menjadi saudara,” tulis Dibben.

Hingga hari ini, saya dan kawan-kawan kami masih bersama. Kami berkumpul di satu tongkrongan yang sama setiap beberapa minggu: meratapi nasib, menertawakan sistem, memastikan satu sama lain baik-baik saja dan membayar satu sama lain makan di warnindo atau warteg favorit. Jalinan persahabatan kami adalah kerja-kerja pembebasan yang kontinu, senantiasa dibongkar namun tetap membangun.

PRODUKTIF SAMPAI MATI: FENOMENA *HUSTLE CULTURE* PADA MAHASISWA

Reporter: Humairah Nur Ramadilah
Kontributor: Hanifah Basirah

Maraknya seruan agar tetap produktif di masa pandemi telah mengubah wajah dari pola bekerja individu. Terutama dalam dua tahun terakhir ini, deretan *feeds* di media sosial yang sebelumnya didominasi oleh potret kehidupan pribadi seseorang kini tergantikan oleh postingan aktivitas produktif selama pandemi. Pada sejumlah kalangan, terutama mahasiswa, fenomena semacam ini memicu munculnya Fear of Missing Out (FoMO) yang membuat mereka seolah merasa tertinggal dan muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang seharusnya mereka kerjakan. FoMO adalah rasa takut akan “tertinggal” karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Sedemikian rupa sehingga sampailah mereka pada pemikiran bahwa bekerja keras merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan eksistensi. Diperparah lagi, bekerja atau berkuliah dari rumah saat pandemi seringkali menghasilkan waktu luang semu bagi mahasiswa, menjadikan mereka mengikuti banyak kegiatan sekaligus, mulai dari kepanitiaan, magang, atau organisasi lainnya yang harus diimbangi dengan tuntutan akademis. Semua ini

menyudutkan mereka pada sebuah kultur bekerja yang tidak sehat—“*hustle culture*”.

Hustle culture merupakan istilah gaya hidup yang mengharuskan individu untuk terus bekerja bahkan hingga menghabiskan waktu luangnya. Dalam istilah yang lebih populer, *hustle culture* juga dapat disebut “gila kerja”. Sekilas nampak mendongkrak produktivitas, *hustle culture* nyatanya bersifat kontraproduktif.

Dr. Arum Etikariena, M.Psi., seorang Psikolog menuturkan bahwa terjadi pergeseran makna dari *hustle culture* ke arah negatif sejak 2020 silam. Jika sebelumnya *hustle culture* dianggap positif dan diasosiasikan dengan kata “tekun”, saat ini, istilah tersebut berubah negatif akibat hilangnya penghalang yang membedakan waktu istirahat dan waktu bekerja. “Sebagian besar kita sekarang di-WFH-kan akibat pandemi, jadi konsep ini jadi agak menyempit ke arah *workaholic* orang yang terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya tanpa memerhatikan beban kerjanya. Karena seolah-olah ketika bekerja di rumah dari pagi hingga malam,

kita tidak bisa memisahkan waktu untuk istirahat dan waktu bekerja,”

Ketika *hustle culture* sudah bersifat toksik hingga memperburuk kesejahteraan mental, apalagi dianggap wajar oleh seseorang yang mengalaminya, maka pola perilaku ini sudah dapat dikatakan sebagai *toxic productivity*. Gabrielle Shannen, seorang *founder startup* Aksel, yang juga merupakan Mahasiswa Berprestasi FMIPA 2020, berkata, “Menurut gue *hustle* itu level pertamanya, kalo *toxic* itu level atasnya. Gue sebagai *founder* pasti juga pernah kena *toxic productivity*, ini dua hal yang berbeda. Toxic productivity lo udah selesain kerjaan lo, ada waktu *me-time*, tapi lo merasa bersalah karena ga ngerjain apa-apa,”

Di Balik *Hustle Culture*

Segala perilaku dan tindakan manusia tidak lepas dari konteksnya sebagai makhluk biopsiko-sosial. Dengan demikian, perilaku dan gagasan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, tidak terkecuali *hustle culture*. Dilansir dari buku *Hustle and Gig Struggling and*

Surviving in the Sharing Economy karya Ravenelle, *hustle culture* lahir dari adanya perubahan sistem menjadi lebih otonom dengan mengedepankan aspek pencapaian individu. Lebih lagi, dengan adanya keterbukaan akses informasi, menjadikan mahasiswa sadar akan pencapaian orang lain dan mulai membandingkannya dengan diri sendiri. Hal ini memicu timbulnya *Fear of Missing Out* (FoMO).

Karakteristik individu juga menjadi salah satu penentu kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam *hustle culture*. Arum menyatakan, berdasarkan perspektif psikologis, terdapat hipotesis dua tipe kepribadian berdasarkan pola bekerja individu, yakni tipe kepribadian A dan B. Hipotesis tersebut menggambarkan Tipe A sebagai individu yang ambisius, terorganisir secara kaku, cemas, proaktif, dan memiliki manajemen waktu yang ketat. Orang dengan kepribadian Tipe A seringkali menjadi “pecandu kerja”. Mereka memaksakan diri dengan tenggat waktu, dan membenci prokrastinasi dan ambivalensi, serta seringkali terpengaruh oleh faktor eksternal hingga mengalami FoMO. Sebaliknya, Tipe B merupakan tipe kepribadian yang santai dan tidak mudah dipengaruhi faktor eksternal. Tipe B tetap dapat bersantai di antara tumpukan tugas yang ada, tetapi tipe ini mudah kewalahan menjelang *deadline*. Di antara kedua tipe kepribadian ini, adalah Tipe A yang lebih rentan untuk tenggelam dalam *hustle culture*. Pertanyaan selanjutnya, apa sesungguhnya implikasi psikologis dari pola bekerja *hustle culture*?

Hustle Culture dan Kesehatan Mental

Hustle culture dan obsesi berlebihan terhadap produktivitas diperoleh bukan tanpa bayaran, kesehatan mental akhirnya men-

jadi taruhannya. Kecenderungan untuk bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan, depresi, energi rendah, kurang fokus, mudah marah, dan kecemasan (Bryant et. al., 2000).

Shannen menuturkan bahwa *hustle culture* saat ini memang dianggap lumrah, meskipun kenyataannya kebiasaan ini merupakan hal yang buruk. “Jujur sebenarnya lumrah, cuma ini sesuatu yang buruk untuk dianggap sebuah kebiasaan karena seharusnya orang-orang bisa nge-set prioritas dia, tergantung orang masing-masing sesuai dengan *long term* dan *short term go-nya*,” ujarnya. Sebagai seorang *founder startup*, Shannen justru memandang gaya hidup ini tidak hanya berdampak buruk untuk individu, tetapi juga perusahaan. Dilansir dari Jefferson Bethke (2019), dampak buruk yang meluas ini terjadi lantaran adanya penurunan produktivitas, tingkat konsentrasi, hingga memburuknya pola komunikasi dari individu yang terlibat *hustle culture* yang toksik.

Solusi Menghadapi Hustle Culture

Dalam sebuah lingkungan organisasi maupun akademis, komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting, baik untuk menumbuhkan ketertarikan emosional satu sama lain maupun untuk menjaga performa. Arum menyarankan agar adanya komunikasi dengan sesama anggota kelompok terkait beban kerja. Komunikasi yang baik akan memudahkan orang lain mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Ia kemudian menawarkan *self regulation* dan konsep *mindfulness* sebagai solusi untuk menghadapi *hustle culture*. Pasalnya, tanpa adanya *self regulation* yang baik, emosi yang tertumpuk akibat rasa kewalahan dapat membuat kita bisa meledak suatu waktu se-

hingga tidak hanya berdampak buruk ke diri sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. *Self regulation* yang baik dan tertib akan meminimalkan dampak negatif dari budaya ini. Sementara itu, dengan mempraktikkan konsep *mindfulness*, kita dapat memahami diri sendiri dan batasan-batasan tubuh kita—kapan kita harus istirahat dan berhenti

Di sisi lain, Shannen menyarankan agar mahasiswa membuat skala prioritas. Dari skala prioritas, mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang perlu didahulukan sehingga tidak keteteran oleh tugas yang ada. Mengikuti banyak kegiatan memang dapat menunjang portofolio, tetapi jangan lupakan kewajiban yang menyertainya—serta fakta bahwa kesehatan kita, baik fisik maupun mental, lebih penting di atas segala deretan CV belaka.

Referensi:

Ravenelle, A. J. (2019). *Hustle and Gig: Struggling and Surviving in the Sharing Economy*. University of California Press.

McLeod, S. (1970, January 1). Type A and type B personality theory: Simply psychology. Type A and Type B Personality Theory | Simply Psychology. Retrieved October 17, 2021, from <https://www.simplypsychology.org/personality-a.html>.

Bethke, J. (2019). *To Hell with the Hustle: Reclaiming Your Life in an Overworked, Overspent, and Overconnected World*. Nelson Books.

Allt, Dorit (2015). College students' academic motivation, media engagement and fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 49(), 111–119. doi:10.1016/j.chb.2015.02.057

Bryan, V., Dennis, K., Gregory M. and Melissa R. (2000). “Evaluating the Effects of Fatigue on Police Patrol Officers: Final Report”. ncjrs.gov. NCJRS.

Prasad, Bhairav & Thakur, Charu. (2019). *Chronic Overworking: Cause Extremely Negative Impact on Health and Quality of Life*. 11-15.

Tim. (2021, August 22). Mengenal 'hustle culture', Gila Kerja Yang Berujung Burnout - Halaman 2. gaya hidup. Retrieved October 2, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210820143703-277-683054/mengenal-hustle-culture-gila-kerja-yang-berujung-burnout/2>.

Mengenal Hustle Culture, Budaya Gila Kerja Generasi Muda. Kedokteran - Universitas Airlangga. (n.d.). Retrieved October 2, 2021, from <https://fk.unair.ac.id/mengenal-hustle-culture-budaya-gila-kerja-generasi-muda/>.

Saya ingat di suatu kelas, salah satu dosen meminta kami, sekumpulan mahasiswa baru, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan asal daerah sebagai mukadimah di pertemuan pertama kami di kelas itu. Saya takjub dengan kemajemukan di kelas kami. Datang dari berbeda-beda kota untuk duduk 'bersama', menghadapi urusan yang sama. Kami juga tampak toleran terhadap satu sama lain. Tidak ada, misalnya, seseorang di sudut Zoom tiba-tiba cekikikan saat mendengar seorang teman berasal dari sebuah kota tidak terkenal, mengira ia datang dari antah-berantah. Adalah sebuah keharmonisan ketika pendidikan mampu menyatukan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, baik itu terkait gender, suku, asal daerah, kepercayaan, taraf ekonomi, dan lain sebagainya.

Kondisi di atas secara tidak langsung memberi kita gambaran terkait konstruksi pendidikan multikultural; sebuah konsepsi progresif yang mengakui betul-betul adanya keberagaman dan di saat yang sama, mengangkat tinggi-tinggi toleransi. Pendidikan menjadi satu ranah penting bagi penguatan multikulturalisme di tengah masyarakat yang heterogen. Pendidikan multikultural sejatinya mengharamkan etnisitas, memangkas etnosentrisme, dan memadamkan bentuk diskriminasi lainnya. Ini menggarisbawahi bahwasanya menjadi multikultural saja belum cukup jika tidak didukung oleh multikulturalisme. Oleh karena itu, dunia pendidikan saat ini dituntut untuk mempersiapkan generasi bangsa yang toleran terhadap kemajemukan, harmonis bersaudara, dan angkat topi

pada perbedaan.

Menjadi tolak ukur bagi universitas-universitas lain di dalam negeri, Universitas Indonesia (UI) tentunya mengemban amanat yang besar dari masyarakat. UI harus mampu menjaga kepercayaan dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga kampus. Dalam hal ini, UI tentunya harus betul-betul menerapkan prinsip serta visi-misi yang digaungkannya sejak awal. Sebagaimana yang dicatat sebagai salah satu prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia di UI, bahwasanya prinsip profesionalisme, keadilan, dan kesamaan hak adalah poin-poin yang dijunjung tinggi. Lebih detail, ini tertuang dalam Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia Pasal 2. Visi formalitasnya adalah demikian, lalu bagaimana dilihat dari kaca mata faktualnya?

Saya mencoba mengambil data yang terkait dengan komposisi staf UI ditilik berdasarkan gender. Data riset ini terangkum dalam dokumen SDG (Sustainable Development Goals) milik UI yang terbit untuk tahun 2020. Hasilnya, sebanyak 2.066 pegawai dari total 4.670 pegawai UI adalah perempuan. Kemudian diikuti oleh berita gembira lainnya, yakni komposisi dosen perempuan yang membukukan angka 51 persen. Tengadah ke jabatan atas, sebanyak 33 persen perempuan menjadi bagian dari susunan Guru Besar UI. Kenyataan ini dikukuhkan pula oleh rasio kelulusan di UI dimana persentase menunjukkan tingkat kelulusan perempuan terhitung lebih tinggi daripada laki-laki. Ini bukan soal persaingan antargender, melainkan pembuktian akan ek-

sistensi persamaan hak tanpa mendiskreditkan satu gender.

Penerapan ekualitas di UI juga didukung melalui pemberian cuti melahirkan bagi staf yang melahirkan dan cuti alasan penting bagi suami yang istrinya melahirkan. Cuti melahirkan tidak mensyaratkan pengurangan gaji. Gaji penuh tetap akan didapatkan, tetapi tidak mendapatkan tunjangan makan dan transportasi selama cuti.

ROMAN KEMAJE DAN EKU KAMP

Teks :Delvi Fuji

Penyediaan fasilitas laktasi dan perawatan anak di lingkungan kampus juga semakin memuluskan realisasi program kesetaraan gender yang ditanam di UI.

Lalu, ke arah mana lagi UI membidikkan kebijakannya? Bekerja sama dengan Yayasan Bani KH Abdurrahman Wahid (YBAW), UI mendirikan sebuah lembaga bernama Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI). Menariknya, pengembangan dan penguatan literasi perempuan menjadi salah satu fokus penting di lembaga ini. Sebab menjadi salah

satu kekhawatiran nasional juga, bahwa patriarkat masih memberi tembok beton di antara kalangan perempuan hebat di negeri ini dan kemajuan yang semestinya sangat berhak mereka dapat. Ketika laki-laki maju, separuh kemenangan sudah di tangan. Tetapi ketika laki-laki dan perempuan sama-sama maju, medan perang dalam genggamannya. Harmoni seperti inilah yang tentu ingin kita lihat bersama di tahun-tahun menda-

Dengan ini, apa yang ingin dicapai UI bisa kita tangkap sedikit banyaknya, yakni menyediakan wadah edukasi yang seinklusif mungkin sehingga mampu dijangkau semua kalangan tanpa terkecuali.

Belum lama ini (29/10/2021), Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) mengunjungi kantor Kemenag guna mendiskusikan pembangunan fasilitas sejumlah rumah ibadah di lingkungan kampus UI. Desain rumah ibadah pun disiapkan oleh Iluni sendiri dengan mengusung konsep ramah lingkungan dan kearifan budaya lokal seperti desain konsep rumah adat. Saya pikir, ini termasuk langkah yang baik untuk mendukung terciptanya moderasi beragama di UI. Tidak hanya mewadahi umat yang mayoritas, UI juga sama membuka tangan bagi umat beragama lain. Saya melihat ini sebagai upaya UI dalam menciptakan romantisme keberagaman yang menyisihkan diskredit terhadap segala bentuk perbedaan.

Dasar-dasar dari konsep multikulturalisme sejatinya berada sangat dekat dengan pelajar dan lingkungan pembelajarannya. Sangat bisa dikatakan jika Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah dasar-dasar penting dari keberadaan pendidikan multikultural. Lingkungan pendidikan yang seperti itulah yang semestinya menjadi target sepanjang hayat sebuah kampus. Dan saya rasa, UI sedang terus melaju ke arah sana, menyempurnakan apa yang sudah ada serta memperbaiki bagian-bagiannya yang kurang. Dari banyak penjurur, ada banyak harapan yang dilemparkan kepada UI. Dari UI untuk negeri, saya rasa bukan hanya sebatas

bualan. Semoga harapan-harapan yang dilemparkan itu mampu dibalas UI dengan sejumlah besar kontribusi.

“Oleh karena itu, dunia pendidikan saat ini dituntut untuk mempersiapkan generasi bangsa yang toleran terhadap kemajemukan, harmonis bersaudara, dan angkat topi pada perbedaan.”

NTISME MUKAN ALITAS DI US UI

a Lestari - FIB

tang.

Selain perkara kesetaraan gender, UI menyoroti pula aksesibilitas disabilitas. Bentuk implementasi dari kebijakan terkait ini adalah fasilitas yang melayani antar jemput bagi staf dan mahasiswa pengguna kursi roda. Fasilitas ramah difabel lainnya juga disebar di seluruh area kampus, mencakup toilet, transportasi, jalan, asrama, dan unit layanan yang dibangun khusus bagi penyandang disabilitas. Ketercakupannya tentu berlaku juga bagi kalangan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) melalui sosialisasi dan penyaluran beasiswa.

Daftar Pustaka:

- Abidin, Zaenal. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. <http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/MENANAMKAN-KONSEP-MULTIKULTURALISME-DI-INDONESIA-Zaenal-Abidin-As.pdf>. Diakses pada 15 November 2021.
- Hartono, Meilani. (2018). Pendidikan Multikultural. <https://pgsd.binus.ac.id/2018/11/23/pendidikan-multikultural/>. Diakses pada 13 November 2021.
- Kemenag.go.id. (2021). Kemenag Dukung Rencana Iluni Bangun Sejumlah Rumah Ibadah di Kampus UI. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dukung-rencana-iluni-bangun-sejumlah-rumah-ibadah-di-kampus-ui>. Diakses pada 14 November 2021.
- Ui.ac.id. (2020). Laporan Pelaksanaan Sustainable Development Goals PBB di Universitas Indonesia 2020. <https://www.ui.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/SDG-UI-2020.pdf>. Diakses pada 13 November 2021.



suara mahasiswa

   @sumaui  Suara Mahasiswa UI  Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa UI

